



# **RENJA**

## **RENCANA KERJA TAHUN 2019**



**SEKRETARIAT DAERAH**  
**PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

## KATA PENGANTAR

Rencana kerja tahun 2019 ini merupakan pedoman dan arahan dalam melaksanakan kegiatan Pembangunan dan sebagai bahan usulan dalam pembahasan dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Diharapkan dengan perencanaan yang baik dan tepat dapat menunjang pencapaian Visi Misi Gubernur Kepulauan Bangka Belitung periode 2017-2022.

Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2019 terdiri dari Pendahuluan, Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja SKPD Tahun Lalu, Tujuan, Sasaran yang menggambarkan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dana indikatif beserta sumbernya serta prakiraan maju berdasarkan pagu indikatif, sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan.

Rencana Kerja (RENJA) sebagai Dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memuat kebijakan dan program / kegiatan dalam satu tahun dan sebagai acuan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2019 dan untuk mereview hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan. Melalui Rencana Kerja diharapkan dapat memberikan kejelasan dan manfaat bagi institusi baik pemerintah maupun mitrakerja.

Pangkalpinang,     Maret 2018

**SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**



**Dr. Yan Megawandi, SH, M.Si**  
**Pembina Utama**  
**NIP. 19640130 198811 1 001**

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>iii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Landasan Hukum .....	4
1.3 Maksud dan Tujuan .....	7
1.4 Sistematika Penyusunan Rencana Kerja .....	8
 <b>BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SETDA TAHUN LALU .....</b>	 <b>11</b>
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah Tahun lalu dan Capaian Renstra Sekretariat Daerah .....	11
 <b>BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN .....</b>	 <b>13</b>
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional .....	13
3.2 Program dan Kegiatan .....	17
 <b>BAB IV PENUTUP .....</b>	 <b>18</b>

## DAFTAR TABEL

No	Judul
II.1	Formulir Evaluasi Triwulan IV Terhadap Hasil Renja OPD Sekretariat Daerah Provinsi kepulauan Bangka Belitung Periode Pelaksanaan Tahun 2017.
III.1	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Setda Tahun 2019 dan Prakiraan Maju Tahun 2020 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Perencanaan pembangunan daerah merupakan suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. Dalam melaksanakan Perencanaan pembangunan daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berwawasan lingkungan.

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang merupakan rencana pembangunan tahunan Perangkat Daerah dan selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 273 ayat 3 menyebutkan bahwa rencana kerja Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

Renja Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2019 disusun melalui 4 (empat) tahapan yaitu pertama persiapan penyusunan Renja; kedua penyusunan rancangan Renja; ketiga pelaksanaan forum PD; dan keempat penetapan Renja. Tahap persiapan dimulai dengan menyusun rancangan keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung tentang pembentukan tim penyusun Renja Sekretariat Daerah, orientasi mengenai Renja Sekretariat Daerah, penyusunan agenda kerja tim penyusun Renja Sekretariat Daerah dan penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah.



Tahap kedua yaitu penyusunan rancangan Renja disusun mengacu pada rancangan awal RKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2019, mengacu pada RPJPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2005-2025 serta Rancangan Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2017-2022, dan mengacu pada hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2017 serta Tahun 2018 untuk melihat ketercapaian sasaran Renstra Sekretariat Daerah berdasarkan pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah tahun-tahun sebelumnya. Renja Sekretariat Daerah juga disusun dengan harapan mampu memecahkan masalah yang dihadapi, menjawab isu-isu penting terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah yang merupakan acuan perumusan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju dan mengakomodir usulan masyarakat yang selaras dengan program prioritas yang tercantum dalam rancangan awal RKPD.

Tahapan ketiga yaitu membahas rancangan Renja Sekretariat Daerah dalam Forum Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pembahasan program dan kegiatan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dilakukan dengan menyelaraskan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan usulan program dan kegiatan biro-biro; menajamkan indikator dan target kinerja program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah; menyelaraskan program dan kegiatan antar Perangkat Daerah di Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam rangka sinergi pelaksanaan dan optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing biro; menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah berdasarkan surat edaran Gubernur Kepulauan Bangka Belitung tentang penyampaian rancangan awal RKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2019. Peserta Forum Perangkat Daerah Provinsi terdiri dari Perangkat Daerah Provinsi, Perangkat daerah kabupaten/kota dan pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat dari

program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Provinsi kepulauan Bangka Belitung.

Hasil kesepakatan pembahasan forum PD dirumuskan dalam berita acara kesepakatan yang ditandatangani oleh setiap unsur yang menghadiri forum PD untuk selanjutnya hasil kesepakatan ini dijadikan sebagai bahan penyempurnaan rancangan Renja PD yang merupakan bahan penyempurnaan rancangan awal RKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Penyempurnaan rancangan Renja dilakukan setelah RKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ditetapkan. Setelah disempurnakan kemudian diverifikasi untuk memastikan rancangan Renja telah sesuai dengan RKPD, untuk selanjutnya Renja Sekretariat Daerah tahun 2019 ditetapkan oleh Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.

Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 1 Seri D). Sebagai lembaga perencanaan, Sekretariat Daerah diharapkan mampu membantu menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Selain itu perencanaan adalah suatu proses kegiatan pengambilan keputusan oleh pemerintah untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan memperhitungkan sumberdaya, IPTEK dan memperhatikan perkembangan global.

Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2019 akan dijadikan pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 yang telah ditetapkan Prioritas Pembangunan Daerahnya, dimana mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan yang dalam penyusunannya juga memperhatikan program dan kebijakan dari Pemerintah Pusat yang dilaksanakan di daerah.

## **1.2. Landasan Hukum**

Landasan hukum yang dijadikan dasar dalam penyusunan Renja Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019 adalah:

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4221);
5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)



- sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
  10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
  13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
  14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3)
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana yang telah diubah menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2007;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
18. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2007 Nomor 5 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 39);
19. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 13 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2007 Nomor 6 Seri E);
20. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);
21. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012-2017 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);
22. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Maksud penyusunan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019 adalah untuk menciptakannya sinergitas dan sinkronisasi perencanaan pembangunan berupa program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah provinsi dengan arah kebijakan, prioritas dan sasaran pembangunan nasional serta usulan program dan kegiatan hasil musrenbang kabupaten/kota yang mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019 yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah.

Tujuan penyusunan Renja Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019 adalah:

1. Menyediakan dokumen perencanaan Sekretariat Daerah untuk jangka 1 (satu) tahun, yaitu tahun 2019;
2. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif, efisien, berkeadilan dan berkelanjutan dalam rangka pelaksanaan pembangunan tahunan daerah yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
3. Memecahkan masalah yang dihadapi, menjawab isu-isu penting terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah

Fungsi Renja Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019 adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan pembangunan di tahun 2019.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Renja Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

##### **BAB I. PENDAHULUAN**

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Renja Sekretariat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

##### **1.1. Latar Belakang**

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja PD, proses penyusunan Renja PD, keterkaitan antara Renja PD dengan dokumen RKPD, Renstra PD, dengan Renja K/L dan Renja kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

##### **1.2. Landasan Hukum**

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan PD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran PD.

##### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja PD.

##### **1.4. Sistematika Penulisan**

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja PD, serta susunan garis besar isi dokumen.

##### **BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA Sekretariat Daerah TAHUN 2017**

##### **2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah Tahun 2017 dan Capaian Renstra Sekretariat Daerah**

Bab ini memuat kajian (*review*) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun 2017 dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun 2017), mengacu pada APBD tahun anggaran

2017. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja tahun-tahun sebelumnya.

## 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Sekretariat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

## 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah

Berisikan uraian mengenai:

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Sekretariat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Sekretariat Daerah; menguraikan mengenai koordinasi dan sinergi program antara Sekretariat Daerah Provinsi dengan Sekretariat Daerah kabupaten/kota serta dengan kementerian dan lembaga di tingkat pusat dalam rangka pencapaian kinerja pembangunan;
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah;
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional;
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Bapepda.

## BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

### 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah.

### 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Sekretariat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Sekretariat Daerah.

### 3.3 Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai:

- a. Faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan;
- b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi:
  - Jumlah program dan jumlah kegiatan.
  - Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.

## BAB IV. PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa:

- a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan;
- b. Kaidah-kaidah pelaksanaan;
- c. Rencana tindak lanjut.



## **BAB II**

### **EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SETDA TAHUN LALU**

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2017 dan pencapaian kinerja Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2012-2017 dilakukan untuk mengidentifikasi sejauhmana kemampuan Sekretariat Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra Sekretariat Daerah serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

#### **2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Sekretariat Daerah**

Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melaksanakan Urusan unsur pendukung layanan . Memperhatikan pembangunan bidang pada RKP tahun 2017 dan program prioritas Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada RKPD tahun 2017 maka Rencana Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2017 mencakup 29 program dan 132 kegiatan namun dengan adanya rasionalisasi kegiatan di tahun 2017 maka terdapat penundaan pelaksanaan kegiatan dan dengan adanya Perubahan Renja Tahun 2017 sehingga pada triwulan IV program yang dilaksanakan sebanyak 29 program dan kegiatan sebanyak 132 kegiatan.

Proporsi Anggaran Perubahan Tahun 2017 yang dikelola Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar Rp 45.790.052.380,00 Belanja Tidak Langsung (Gaji dan Tunjangan Pegawai) Rp 44.824.152.380,00 dan Belanja Langsung Rp 965.900.000,00

Capaian target kinerja dan penyerapan anggaran dari program/kegiatan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Triwulan IV Tahun 2017 dihitung berdasarkan laporan hasil realisasi pelaksanaan Renja yang tertuang pada DPA Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Triwulan IV (bulan Oktober sampai dengan bulan Desember) Tahun 2017.

Persentase capaian kinerja dan penyerapan anggaran dari Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dilakukan dengan menghitung rata-rata persentase capaian program dan kegiatan pada triwulan ke IV sebesar 92,47 % dapat terlihat pada tabel II.1 (terlampir)

## **BAB III**

### **TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

#### **3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi**

Renja Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018 disusun dengan mengacu dan berpedoman pada :

- a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019,
- b. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2005-2025,
- c. Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2019,
- d. Program Strategis Nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat,
- e. Rancangan Renstra awal 2017-2022 Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung serta
- f. Mempertimbangkan isu-isu yang berkembang.

Upaya mewujudkan tujuan negara dilaksanakan melalui proses yang bertahap, terencana, terpadu dan berkesinambungan. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2015-2019 menetapkan bahwa visi pembangunan nasional tahun 2015-2019 adalah terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong-royong.

Upaya untuk mewujudkan visi ini adalah melalui 7 Misi Pembangunan yaitu:

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeadilan, dan demokratis berlandaskan negara hukum.
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.

4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera.
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional.
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2019 adalah **“Memacu Investasi dan Infrastruktur untuk Pertumbuhan dan Pemerataan”**. Pendekatan Penyusunan RKP RI tahun 2019 dilakukan dengan perkuatan pelaksanaan prinsip *Money Follows Program*. Penguatan tersebut dilaksanakan dengan pendekatan pembangunan holistik-tematik, integratif dan spasial dengan memperhatikan pada :

- Pengendalian Perencanaan;
- Perkuatan perencanaan dan penganggaran untuk RKP 2019;
- Perkuatan perencanaan berbasis kewilayahan;
- Perkuatan integrasi sumber pendanaan.

Adapun Prioritas pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam RKP Tahun 2019 terdiri dari 10 Prioritas dan 30 Program Prioritas antara lain sebagai berikut:

1. Pendidikan
  1. Pendidikan Vokasi
  2. Peningkatan Kualitas Guru
2. Kesehatan
  3. Peningkatan Kesehatan Ibu dan anak
  4. Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit
  5. Preventif dan Promotif (Gerakan Masyarakat Hidup Sehat)
3. Perumahan dan Pemukiman
  6. Penyediaan Perumahan Layak
  7. Air Bersih dan Sanitasi

4. Pengembangan Dunia Usaha dan Pariwisata
  8. Pengembangan 3 Kawasan Pariwisata (dari 10)
  9. Pengembangan 5 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) (dari 10)
  10. Pengembangan 3 Kawasan Industri (KI) (dari 14)
  11. Perbaikan Iklim Investasi dan Penciptaan Lapangan Kerja
  12. Peningkatan Ekspor Barang dan Jasa Bernilai Tambah Tinggi
5. Ketahanan Energi
  13. EBT dan Konservasi Energi
  14. Pemenuhan Kebutuhan Energi
6. Ketahanan Pangan
  15. Peningkatan Produksi Pangan
  16. Pembangunan Sarana dan Prasarana Pertanian (termasuk irigasi)
7. Penanggulangan Kemiskinan
  17. Jaminan dan Bantuan Sosial Tepat Sasaran
  18. Pemenuhan Kebutuhan dasar
  19. Perluasan akses usaha mikro, kecil dan koperasi
8. Infrastruktur, konektivitas, dan kemaritiman
  20. Pengembangan Sarana dan Prasarana Transportasi (darat, laut, udara, dan inter-moda)
  21. Pengembangan Telekomunikasi dan Informatika
9. Pembangunan Wilayah
  22. Pembangunan Wilayah Perbatasan dan Daerah Tertinggal
  23. Pembangunan Perdesaan
  24. Reforma Agraria
  25. Pencegahan dan Penanggulangan Bencana (a.l Kebakaran Hutan)
  26. Percepatan Pembangunan Papua

## 10. Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan

- 27. Penguatan Pertahanan
- 28. Stabilitas Politik dan Keamanan
- 29. Kepastian Hukum
- 30. Reformasi Birokrasi

Tema pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2019 adalah “Peningkatan Kualitas SDM Menuju Pembangunan Ekonomi yang Mandiri Berbasis Agribahari dan Berdaya Saing”. sebagai upaya untuk mewujudkan tercapainya visi misi Gubernur tersebut, maka pembangunan daerah tahun 2019 diarahkan pada upaya pemantapan ekonomi masyarakat dengan kemandirian dan keadilan diberbagai kawasan yang ditandai dengan mulai meratanya hasil-hasil pembangunan yang dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat.

Makna tema Pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019 adalah:

1. Kualitas SDM adalah suatu peranan penting dalam upaya untuk memantapkan pembangunan ekonomi daerah. Dukungan SDM yang berkualitas, profesional, berwawasan IPTEK dan berbekal IMTAQ yang kuat menjadi satu kesatuan dengan upaya untuk mempersiapkan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam menghadapi tantangan global. Peningkatan kualitas SDM ini menjadi sangat penting untuk diprioritaskan dalam upaya untuk menjadikan masyarakat Bangka Belitung sebagai “pemain/subjek” dan bukan “penonton/objek” dari pesatnya pelaksanaan pembangunan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2. Mandiri menunjukkan bahwa pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berlandaskan atas kemampuan sendiri dan memungkinkan dapat bekerjasama dengan pihak lain yang saling menguntungkan seperti melalui kerjasama pengembangan infrastruktur, ekonomi, sosial, budaya dan pemerintahan.



3. Pembangunan Ekonomi dimaknai dengan pemerataan pembangunan yang lebih berorientasi pada pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan melalui strategi yang dilaksanakan dengan menjamin ketersediaan infrastruktur yang disesuaikan dengan kebutuhan antarwilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sehingga mendorong investasi baru, lapangan kerja baru, meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan masyarakat sebagai dampak dari bergeraknya ekonomi lokal.
4. Berbasis agribahari adalah cerminan untuk mewujudkan pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai wilayah agri bahari yang dilaksanakan melalui pemanfaatan potensi unggulan daerah yaitu pertanian (agrikultur) dan kelautan perikanan. Agrikultur, dimaknai secara luas meliputi sub sektor pertanian rakyat, perkebunan, perikanan dan pengembangan potensi peternakan. Sementara itu, kebaharian diterjemahkan tidak hanya terkait dengan hasil perikanan laut saja melainkan juga potensinya di sektor transportasi (pelabuhan) serta kepariwisataan beserta sektor-sektor pendukungnya.
5. Daya saing dimaknai sebagai kapasitas dan kemampuan berkompetisi yang dihasilkan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk menghadapi segala tantangan pembangunan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat Bangka Belitung.

Untuk mendukung pelaksanaan tema pembangunan tersebut di atas, prioritas pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang ditetapkan dalam RKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019 adalah:

1. Peningkatan Ekonomi;
2. Kapasitas dan Kualitas Sumber Daya Manusia;
3. Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanan Publik;
4. Kesenjangan Pembangunan Antar Wilayah dan Masyarakat;
5. Pembangunan Berdemokrasi;
6. Penanggulangan Bencana;

### **3.2 Program dan Kegiatan**

Rumusan rencana program dan kegiatan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2019 dan prakiraan maju tahun 2020 dapat di lihat pada tabel III.1 (terlampir)

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Rencana Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan dokumen perencanaan tahunan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dimana penyusunan dokumen tersebut sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa setiap Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Tahunan SKPD.

Rencana kerja merupakan tolok ukur penting dari suatu sistem akuntabilitas kinerja. Perencanaan kerja akan mengilhami tugas pokok dan fungsi pada Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di masa yang akan datang secara terencana dan terkoordinasi. Dengan demikian akan tercipta keinginan untuk meningkatkan kinerja dan fokus perbaikan di masa yang akan datang.

Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2019 sebagai pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program dan kegiatan tahun 2019. Rencana Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang telah disusun ini merupakan komitmen dari pimpinan dan seluruh staf Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung demi terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Dengan disusunnya Rencana Kerja ini, Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah mempersiapkan diri untuk melaksanakan kegiatan dengan terencana dan terkoordinasi, dan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai pada Tahun 2017, dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul.

Demikian rencana kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung beserta kegiatannya. Diharapkan dapat berguna bagi kita dalam rangka menjabarkan pelaksanaan visi dan misi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Evaluasi Triwulan IV Terhadap Hasil Renja OPD  
Sekretariat Daerah Provinsi kepulauan Bangka Belitung  
Periode Pelaksanaan Tahun 2017

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	IndikatorKinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2017 (Akhir Periode Renstra SKPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s.d. Renja SKPD Tahun Lalu (2016)		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2017)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi (2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2017 (%)				Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2017 (AkhirTahun Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2017)				Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2017 (%)				Unit SKPD Penang gung jawab	Ket.
													I		II		III		IV																	
													K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp																
1	2				3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7 x 100 %		14 = 6 + 12		15=14/5 x100		16	17						
1	1.20	1.20	03	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya sarana dan prasaran pelayanan adminstrasi perkantoran	100%	156.304.000,00	100	104.090.629,00	100	30.417.404.037,00	25	4.059.919,00	25	8.205.480,00	25,00	5.781.984,00	25,00	15.390.236,00		33.437.619,00		1.137,95		137.528.248,00										
	1.20	1.20	03	01	0100	Penyediaan jasa surat menyurat	60	1.048.000	48	503.576	12	1.095.578.412	0		6	4.200,00	3,00	13.877,00	3,00	944.684,00	12	962.761,00	100,00	0,09	60	1.466.337,00	100,00	-	Biro Umum							
	1.20	1.20	03	01	0200	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	60	22.900.000	48	11.365.478	12	4.054.500	3	741.718,00	3	1.170.260,00	3,00	842.324,00	3,00	991.064,00	12	3.745.366	100,00	92,38	60	15.110.844	100,00	-								
	1.20	1.20	03	01	0300	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	60	3.121.000	48	3.178.918	12	2.158.255.625	3	165.743,00	3	453.801,00	3,00	154.579,00	3,00	1.381.479,00	12	2.155.602	100,00	0,10	60	5.334.520	100,00	-								
	1.20	1.20	03	01	0700	Penyediaan jasa administrasi keuangan	60	3.255.000	48	2.025.015	12	501.636.000	3	125.520,00	-	-	3,00	128.010,00	3,00	241.221,00	9	494.751	75,00	0,10	57	2.519.766	95,00	-								
	1.20	1.20	03	01	0800	Penyediaan jasa kebersihan kantor	60	4.288.000	48	3.199.953	12	690.000.000	3	21.993,00	3	221.908,00	3,00	244.974,00	3,00	198.992,00	12	687.867	100,00	0,10	60	3.887.820	100,00	-								
	1.20	1.20	03	01	0900	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	60	1.085.000	48	642.882	12	435.000.000	3	80.982,00	3	124.498,00		-	3,00	189.437,00	9	394.917	75,00	0,09	57	1.037.799	95,00	-								
	1.20	1.20	03	01	1000	Penyediaan alat tulis kantor	60	4.114.000	48	2.927.775	12	700.000.000	3	90.682,00	3	147.880,00	3,00	79.764,00	3,00	381.168,00	12	699.494	100,00	0,10	60	3.627.269	100,00	-								
	1.20	1.20	03	01	1100	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	60	2.977.000	48	1.728.996	12	600.000.000	3	104.069,00	3	153.334,00	3,00	50.857,00	3,00	157.718,00	12	465.978	100,00	0,08	60	2.194.974	100,00	-								
	1.20	1.20	03	01	1200	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	60	733.000	48	420.087	12	175.000	3	39.785,00	3	39.923,00		-	3,00	95.123,00	9	174.831	75,00	99,90	57	594.918	95,00	-								
	1.20	1.20	03	01	1300	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	60	10.702.000	48	5.919.871	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48	5.919.871	80,00	-							
	1.20	1.20	03	01	1400	Penyediaan peralatan dan bahan pembersih, laundry, makan minum rumah tangga KDH dan WKDH	60	3.284.000	48	2.338.094	12	192.000.000	3	29.000,00	3	48.000,00	3,00	24.000,00	3,00	88.000,00	12	189.000	100,00	0,10	60	2.527.094	100,00	-								
	1.20	1.20	03	01	1500	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan	60	2.945.000	48	1.813.003	0	-	-	-	-	-	3,00	-	-	-	3	-	-	-	51	1.813.003	85,00	-								

1.20	1.20	03	01	1600	Penyediaan bahan logistik kantor	Tersedianya makanan dan minuman untuk kegiatan - kegiatan pelayanan tamu rapat dan acara - acara ataupun event/ agenda-agenda kegiatan Pemerintah Prov. Kep. Bangka Belitung	60	521.000	48	258.472	12	108.345.000	3	8.885,00	3	12.530,00	3,00	7.110,00	3,00	26.635,00	12	55.160	100,00	0,05	60	313.632	100,00	-	-	-	-	-																				
1.20	1.20	03	01	1700	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman untuk kegiatan - kegiatan pelayanan tamu rapat dan acara - acara ataupun event/ agenda-agenda kegiatan Pemerintah Prov. Kep. Bangka Belitung	60	15.900.000	48	10.835.534	12	4.840.637.500	3	504.532,00	3	1.441.192,00	3,00	601.794,00	3,00	2.271.503,00	12	4.819.021	100,00	0,10	60	15.654.555	100,00	-	-	-	-	-																				
1.20	1.20	03	01	1800	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi langsung ke luar daerah	60	29.600.000	48	22.744.546	12	6.650.000.000	3	614.092,00	3	1.194.284,00	3,00	1.125.091,00	3,00	3.173.057,00	12	6.106.524	100,00	0,09	60	28.851.070	100,00	-	-	-	-	-																				
1.20	1.20	03	01	1900	Penyediaan Jasa Penunjang Pengelolaan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terperuhnya honorarium pegawai non PNS pengelolaan administrasi perkantoran	60	14.220.000	48	9.579.460	12	5.788.946.000	3	1.333.200,00	3	1.320.000,00	3,00	1.342.000,00	3,00	1.777.600,00	12	5.772.800	100,00	0,10	60	15.352.260	100,00	-	-	-	-	-																				
1.20	1.20	03	01	2200	Penyediaan jasa pelayanan tamu Pemerintah	Tersedianya fasilitas tamu - tamu Pemerintah Provinsi (transportasi dan akomodasi, hotel, makan siang/snack)	60	11.400.000	48	8.732.752	12	2.075.802.000	3	119.117,00	3	340.982,00	3,00	217.083,00	3,00	976.263,00	12	1.653.445	100,00	0,08	60	10.386.197	100,00	-	-	-	-	-																				
1.20	1.20	03	01	2300	Pembinaan Administrasi Pemerintah dan Pelaksanaan Pembangunan Pemerintah Kab/Kota	Terlaksananya perjalanan dinas dalam daerah	60	6.350.000	48	4.474.344	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48	4.474.344	80,00	-	-	-	-	-																				
1.20	1.20	03	01	2400	Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan	Tersedianya jasa general chek up bagi Gubernur, Wakil Gubernur dan keluarganya	1	40.000	0	-	1	40.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																				
1.20	1.20	03	01	2600	Kegiatan rumah dinas Gubernur	Tersedianya sewa peralatan dan perlengkapan (meja, kursi, tenda, Sound system, panggung dan dekorasi) dan makan minum serta pakaian seragam panitia dalam menunjang kegiatan di rumah dinas Gubernur	60	12.700.000	48	9.011.237	12	2.014.000	-	-	6	998.250,00	3,00	451.580,00	-	-	9	1.449.830	75,00	71,99	57	10.461.067	95,00	-	-	-	-	-																				
1.20	1.20	03	01	7400	Biaya Operasional Pengelolaan Gedung Kantor (Wisma Bougenville)	Tersedianya operasional pengelolaan gedung wisma Bougenville	48	3.724.000	36	1.980.804	12	2.299.000.000	-	-	6	215.179,00	3,00	325.700,00	3,00	1.735.041,00	12	2.275.920	100,00	0,10	48	4.256.724	100,00	-	-	-	-	-																				
1.20	1.20	03	01	8001	Pembinaan Administrasi Pengelolaan Keuangan Intern SKPD Sekretariat Daerah	Sosialisasi pengadministrasi pengelolaan keuangan daerah di SKPD Sekretariat Daerah	3	185.000	1	47.000	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	47.000	33,33	-	-	-	-	-																				
1.20	1.20	03	01	8800	Koordinasi, konsolidasi ke dalam daerah	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi langsung ke dalam daerah	24	945.000	12	362.832	12	2.275.920.000	3	80.601,00	3	319.259,00	3,00	173.241,00	3,00	761.251,00	12	1.334.352	100,00	0,06	24	1.697.184	100,00	-	-	-	-	-																				
1.20	1.20	03	01	9400	Pengelolaan Inventaris aset dilingkungan Setda	Tercatat dan tertatanya inventaris aset dilingkungan Sekretariat Daerah	2	267.000	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																				
Rata-rata capaian kinerja (%)																						70,83	11,07																													
Predikat Kinerja																						R	SR																													
2	1.20	1.20	03	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terperuhnya Sarana dan prasarana aparatur daerah		201.346.000,00		96.912.589,00		14.568.016.772,00		450.410,00		4.257.437,00		2.439.281,00		5.851.928,00		12.999.056,00				109.911.645,00																										
1.20	1.20	03	02	0100	Pembangunan rumah jabatan	Pembangunan dilingkungan rumah jabatan	3	311.000	3	305.992	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	3,00	305.992,00	100,00	-	-	-	-	-	-																				

1.20	1.20	03	02	0300	Pembangunan gedung kantor	DED dan pembangunan gedung kantor	15	7.711.000	5	3.904.496	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	5,00	3.904.496,00	33,33	-	-	-		
1.20	1.20	03	02	0349	Rehab gedung serba guna	Terpeliharanya gedung serba guna	2	2.738.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-		
1.20	1.20	03	02	0350	DED Rehabilitasi Wisma Bougenville	Tersedianya DED rehabilitasi Wisma Bougenville	1	153.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-		
1.20	1.20	03	02	0352	Pembangunan Masjid fan ruang pers	Tersedianya sarana ibadah dan ruang pers	2	5.300.000	2	4.771.499	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	2,00	4.771.499,00	100,00	-	-	-		
1.20	1.20	03	02	0505	Pengadaan Mobil pemadam kebakaran	Tersedianya Mobil pemadam kebakaran	1	1.700.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-		
1.20	1.20	03	02	0506	Pengadaan kendaraan operasional Korem	Tersedianya Mobil operasional Korem	3	1.600.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-		
1.20	1.20	03	02	0400	Pengadaan mobil jabatan Gub/wagub	Kendaraan mobil jabatan Gub/wagub	8	6.300.000	4	1.439.127	4	2.135.560	-	-	-	-	-	-	-	-	4,00	1.439.127,00	50,00	-	-	-		
1.20	1.20	03	02	0500	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Kendaraan operasional dilingkungan Sekretariat Daerah (minibus, truck, pick up, motor)	93	27.200.000	80	19.771.116	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	80,00	19.771.116,00	86,02	-	-	-		
1.20	1.20	03	02	0600	Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	Tersedianya sarana dan prasarana perlengkapan rumah jabatan dan kantor	150	3.806.000	127	3.348.544	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	127,00	3.348.544,00	84,67	-	-	-		
1.20	1.20	03	02	0700	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya sarana dan prasarana perlengkapan gedung kantor dilingkungan Sekretariat Daerah	125	7.600.000	110	3.226.891	14	581.740.000	-	5	499.355,00	-	5,00	70.100,00	10	569.455,00	71,43	0,10	120,00	3.796.346,00	96,00	-	-	
1.20	1.20	03	02	0800	Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas	Tersedianya gordenvitrage, rempel meja makan, sarung kursi, keset kaki, karpet, pot dan bunga plastik, pompa steam mobil, dan trolley minuman, penghias ruangan, peralatan dapur	100	2.668.000	87	2.194.612	10	528.840.000	-	6	191.386,00	2,00	56.743,00	2,00	273.649,00	10	521.778,00	100,00	0,10	97,00	2.716.390,00	97,00	-	-
1.20	1.20	03	02	0900	Pengadaan peralatan gedung kantor	Mesin T.K, mesin fotocopy, Mesin penghancur kertas, televisi, podium/mimbar, komputer, printer, scanner, dispenser, proyektor, alat-alat audio visual, sound sistem, alat panggil elektronik,CCTV, Stegger mobile dan GPS	125	5.105.000	102	3.988.086	13	918.426.972	-	12	257.565,00	-	1,00	614.646,00	13	872.211,00	100,00	0,09	115,00	4.860.297,00	92,00	-	-	
1.20	1.20	03	02	0927	Pengadaan Baleho di Kabupaten/Kota	Tersedianya baleho di Kabupaten/kota dilingkungan Prov.Kep. Bangka Belitung	8	1.400.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.20	1.20	03	02	1000	Pengadaan Meubelair	Meja kerja, meja rapat, meja makan, kursi meja, kursi rapat, tempat tidur, sofa, kursi tunggu, rak buku / tv / kembang, meja resepsionis, almari - almari dan meubelair lainnya.	40	5.142.000	28	2.070.238	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28,00	2.070.238,00	70,00	-	-	-		
1.20	1.20	03	02	2000	Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan	Terpeliharanya lingkungan rumah jabatan Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah	60	8.042.000	48	5.139.623	12	1.159.600.000	3	24.950,00	3	249.747,00	3,00	236.994,00	3,00	323.090,00	12	834.781,00	100,00	0,07	60,00	5.974.404,00	100,00	-
1.20	1.20	03	02	2200	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor di lingkungan Sekretariat Daerah	60	11.900.000	48	8.169.653	12	2.608.000.000	3	149.515,00	3	922.484,00	3,00	207.805,00	3,00	823.498,00	12	2.103.302,00	100,00	0,08	60,00	10.272.955,00	100,00	-
1.20	1.20	03	02	2300	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	Teraksaniannya Service, Suku Cadang dan BBM Kendaraan Dinas KDH, WKDH & Rmh tangga	60	9.000.000	48	3.694.072	12	1.008.700.000	3	64.369,00	3	164.912,00	3,00	128.135,00	3,00	382.798,00	12	740.214,00	100,00	0,07	60,00	4.434.286,00	100,00	-
1.20	1.20	03	02	2400	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional sekretariat daerah	60	29.100.000	48	14.834.670	12	3.970.520.000	3	116.559,00	3	984.373,00	3,00	1.081.250,00	3,00	1.477.430,00	12	3.659.612,00	100,00	0,09	60,00	18.494.282,00	100,00	-
1.20	1.20	03	02	2500	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas	Terpeliharanya perlengkapan rumah jabatan/dinas di lingkungan Seda	60	5.500.000	48	3.295.683	12	494.840.000	-	6	345.755,00	-	6,00	35.886,00	12	381.641,00	100,00	0,08	60,00	3.677.324,00	100,00	-	-	
1.20	1.20	03	02	2600	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor	60	5.000.000	36	1.096.770	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36,00	1.096.770,00	60,00	-	-	-		

















[illegible]

					Bimbingan teknis penyusunan perjanjian kinerja (PK) dan laporan kinerja instansi pemerintah (LAPKIN) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Outcome : Jumlah peserta bintek yang memahami penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) dan laporan kinerja pemerintah (LAPKIN) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Output : Terlaksananya bintek perjanjian kinerja (PK) dan laporan kinerja instansi pemerintah (LAPKIN) prov Kep Babel	100%	230.000.000			60 orang	82.828.000	-	74.083.500	60 orang	3.250.000	-	0		0	60 orang	77.333.500	100%	93%	100%	77.333.500	100%	34%			
					Penyusunan perjanjian kinerja (PK) tahun 2017 dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAPKIN) tahun 2016 Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Outcome : Tersedianya LAPKIN 2016 dan TAPKIN 2017 Output : Tersusunnya LAPKIN 2016 dan TAPKIN 2017	100%	250.000.000	80%	112.386.300	2 dokumen	104.700.000	-	2.000.000	-	0	-	30.621.000		53.254.890	-	85.875.890	100%	82%	100%	198.262.190	100%	79%			
					Pembinaan pelaksana penyusunan perjanjian kinerja (PK) dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Prov Kep Babel	Outcome : Terkendalinya penyusunan PK dan LAPKIN Kabupaten/Kota Output : Terlaksananya movev perjanjian kinerja dan LAPKIN	100%	150.000.000	80%	94.015.000	12 bulan	66.638.250	-	0	-	0	-	0		-	0	100%	0%	100%	94.015.000	100%	63%				
Rata-rata capaian kinerja (%)																						100%	41%								
Predikat Kinerja																						SR	SR								
23					Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi					1.985.259.734,00		2.308.815.000,00																		BIRO KESRA	
					Peningkatan Kecintaan Terhadap NKRI	Mempertebal rasa Patriotisme berbangsa dan bermegara	100			1.227.730.000,00	5.000	1.240.180.000,00	-	-	-	5000	138.500.000,00		1.060.568.000,00	5.000,00	1.199.068.000,00	100,00	96,68	5000	2.426.798.000,00	5.000,00					
					Peningkatan kecintaan bermasyarakat	terciptanya harmonisasi masyarakat prov bangka belitung	2000			666.381.800,00	1500	1.046.630.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	666.381.800,00	-						
					Sinkronisasi dan implementasi bidang kesejahteraan	tercapainya kesepakatan dalam pengimplementasian kegiatan Prov dan kab/kota	75			91.147.934,00	30	22.005.000,00	30	15.355.000,00	-	-	-	-		30,00	15.355.000,00	100,00	69,78	30,00	106.502.934,00	93,04					
Rata-rata capaian kinerja (%)																							55,49								
Predikat Kinerja																						SR	SR								
24					Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa			746.000.000,00			-		1.041.535.680,00		16.335.680,00	11,43		-	-	-	36.225.000,00	35,65	60.435.680,00			60.435.680,00					
					Penguatan Fungsi Pelayanan Pusat Pelayanan Informasi Daerah (PPID)	Tertelaksananya pelayanan fungsi PPID/Lancarnya pelayanan fungsi PPID	100	68.900.000,00	0		-	100	64.435.680,00	24	16.335.680,00	11,43	7.875.000,00		-	0	36.225.000	36	60.435.680,00		36	93,79	36	60.435.680,00	35,65	87,72	Biro Humaspro
					Publikasi dan Siaran	penyebaran informasi pembangunan daerahTertelaksananya informasi pembangunan daerah	100	677.100.000,00	0		-	100	977.100.000,00	21	143.560.000,00	13,86	93.830.000,00		-	0	712.074.558	35	949.464.558,00		35,06	97,17	35	949.464.558,00	35,06	140,23	Biro Humaspro
Rata-rata capaian kinerja (%)																						35	95,48				227,94				
Predikat Kinerja																						SR	SR								
25					Program Peningkatan Kerjasama Daerah			1.400.000.000		393.140.596		630.198.000		102.521.490						14%	613.256.567									Biro Pemerintah	
					Kegiatan Partisipasi Kontribusi luran dan Keikutsertaan dalam Rakor/ Rakernas APPSL	Tertelaksananya pembayaran iuran APPSL dalam rangka menunjang program/kegiatan APPSL	4 kali rapat dan 1 kali iuran	400.000.000	100%	169.336.426	12 bulan	268.800.000	3 bulat n	94.813.120	6 bulan	104.229.120	6 bulan	113.489.711		(46.940.520)	49%	265.591.431		98,81							
					Kegiatan Partisipasi Kontribusi luran dan Keikutsertaan dalam Rapat Kerja BKS Provinsi Kepulauan.	Tertelaksananya pembayaran iuran BKS Provinsi Kepulauan dalam rangka menunjang program/kegiatan BKS	4 kali rapat dan 1 kali iuran	400.000.000	99%	223.804.170	12 bulan	219.980.000	-	-	6 bulan	176.821.180	6 bulan	185.563.180		(144.253.666)	-	218.130.694,00		99,16							
					Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kesepakatan dan perjanjian Kerjasama Daerah	Tertelaksananya pertemuan pengembangan kerjasama antar daerah, pihak ketiga dan luar negeri	1 kali rapat	200.000.000	-	-	1 kali rapat	141.418.000	10 kali rapa t	7.708.370	10 kali rapat	54.184.490	10 kali rapat	66.840.540		801.042	5%	129.534.442		91,60							

[illegible]

						Koordinasi penyelenggaraan Pigub 2017	Terlaksananya koordinasi penyelenggaraan pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur	-	-	-	-	7 Kab/Kota	97.680.000	7 Kab/Kota	52.390.072	7 Kab/Kota	80.441.711	7 Kab/Kota	80.441.711	(118.515.933)	0%	94.757.561		97,01																																				
Rata-rata capaian kinerja (%)																								48,50																																				
Predikat Kinerja																																																												
29						Peningkatan Mutu Pendidikan dan tenaga pendidik							420.458.800,00				334.090.000.00																		BIRO KESRA																									
						pelaksanaan kegiatan Tp UKS	meningkatnya mutu pendidikan seprovinsi	96					690.000.000,00					334.090.000,00	-	-	0	133.292.320,00	28,00	96.247.000,00			44.468.280,00	28,00	274.007.600,00	100,00	82,02	28,00	694.466.400,00	29,17																										
Rata-rata capaian kinerja (%)																								-	82,02																																			
Predikat Kinerja																							SR		SR																																			
30						Peningkatan Pengamalan Terhadap Kehidupan Beragama							5.428.517.296,00				7.276.009.000,00																			BIRO KESRA																								
						Peningkatan keamanan dan ketagawaan pada hari jum'at	terjalinya tat salahsatunya antar prov dengan pemerintah kab/kota	24					325.000.000,00					290.269.000,00	20			208.030.000,00	6		9.436.000,00	3	90.859.000,00	8,00	47.806.000,00			59.238.000,00	17,00	207.339.000,00	85,00	99,67	17,00	497.608.000,00	70,83																					
						Peningkatan Kehidupan Beragama Pada BULAN Ramadhan	Terselenggaranya Sa'at Ramadhan di 7 Kab/Kota	14					750.000.000,00					609.948.700,00	17			625.100.000,00	0		6.550.000,00	17	214.113.000,00	0	338.951.000,00			8.888.000,00	17,00	568.502.000,00	100,00	90,95	17,00	1.178.450.700,00	121																					
						Penyelangan pemberangkatan dan Pemulangan Haji	Persentase terfasilitasinya pemberangkatan/pemulangan haji	1000					1.150.000.000,00					697.893.480,00	1100			848.600.000,00	-		-	-	8.021.000,00	0		-		757.278.400,00	-	765.299.400,00		90,18	-	1.463.192.880,00	0																					
						Pembinaan dan Pemberangkatan Kafilah STQ/MTQ	Jumlah Kafilah yang mengikuti STQ	70					850.000.000,00					1.133.795.907,00	14			813.319.000,00	-		-		19.452.600,00	14	476.489.000,00			28.052.720,00	14,00	523.994.320,00		64,43	14	1.657.790.227,00	20,00																					
						Seleksi STQ/MTQ engkat Provinsi	Jumlah stq tingkat provinsi	180					750.000.000,00					198.520.000,00	98			740.530.000,00	-		-	0	176.651.000,00	61	562.880.000,00			-	61,00	739.531.000,00		99,67	61	938.051.000,00	33,89																					
						Pendampingan Jemaah Haji Provinsi	Jumlah Petugas Haji daerah TPHD/TKHD	20					500.000.000,00					422.765.549,00	9			504.080.000,00			52.462.390,00	-	17.135.800,00	7	394.978.249,00			7.700.000,00	7,00	472.276.439,00		93,69	7	895.041.988,00	35,00																					
						Peningkatan pengetahuan keagamaan bagi masyarakat	bertambahnya pengetahuan keagamaan	3000					500.000.000,00					228.632.700,00	3000			644.750.000,00	-		-	0	14.908.000,00	0	14.908.000,00			497.696.926,00	-	527.512.926,00		81,82	-	756.145.626,00	-																					
						pembayaan Transportasi Domestik Jemaah haji	Persentase biaya Transportasi Domestik yang dibantu	1000					2.500.000.000,00					1.846.691.960,00	1069			2.891.600.000,00	-		-	0	11.551.000,00	1069	1.302.807.500,00			1.498.043.200,00	1.069,00	2.812.401.700,00		97,26	1.069	4.659.093.660,00	106,90																					
Rata-rata capaian kinerja (%)																								92,50	89,73																																			
Predikat Kinerja																							SR		SR																																			
31						Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan,Penggunaan dan Pemanfaatan tanah							500.000.000					-				-																					Biro Pemerin tahan																	
						Kegiatan Pensaertifikasi tanah milik Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Terbitnya sertifikat	50 persil					500.000.000					-			-																						tidak ada kegiatan																	
Rata-rata capaian kinerja (%)																								92,50	92,47																																			
Predikat Kinerja																							SR		SR																																			
TOTAL RATA-RATA CAPAIN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM 1 S.D 31)																								(4.653.314,89)	29																																			
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 S.D 31)																								SR	SR																																			

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2019**  
**DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020**  
**PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 (N+1)	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
0				Non Urusan								
0	0			-								
0	0	8		<b>Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah</b>		<b>Tingkat kepuasan Aparatur Perangkat Daerah terhadap pelayanan Kesekretariatan</b>	100%	36.505.622.160			100%	
0	0	8	1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Luar Daerah, Provinsi, SKPD, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur, Bangka, Pangkal Pinang	Jumlah Aparatur Perangkat Daerah yang terlayani selama 12 bulan	100%	20.488.718.000	-		100%	32.181.720.900
0	0	8	2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Provinsi, SKPD	Jumlah Aparatur Perangkat Daerah yang memanfaatkan sarana prasarana perkantoran selama 12 bulan	100%	13.813.004.160	-		100%	14.453.654.368
0	0	8	3	Peningkatan Disiplin Aparatur	Provinsi, SKPD	Jumlah Aparatur Perangkat Daerah yang meningkat disiplinnya	100%	0	-		100%	1.083.448.800
0	0	8	5	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Provinsi	Jumlah Aparatur Perangkat Daerah yang meningkat kapasitasnya	150 Orang	0	-		150 Orang	630.000.000
0	0	8	6	Peningkatan pelayanan kedinasan Kepala Daerah/Wakil Daerah	Luar Daerah, Provinsi, SKPD, Belitung Timur, Pangkal Pinang, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung	Persentase pelayanan kedinasan kepala daerah dan wakil kepala daerah	100%	2.203.900.000	-		100%	2.314.095.000

3												
3	37			<b>Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah</b>								
3	37	20		<b>Program Peningkatan Koordinasi Kebijakan Perekonomian</b>		<b>Prosentase Koordinasi Kebijakan Perekonomian</b>	<b>100%</b>	<b>975.000.000</b>			100%	
3	37	20	1	Monitoring dan Evaluasi Sistem Resi Gudang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Provinsi, Luar Daerah, SKPD	Jumlah Laporan peningkatan sarana prasarana perekonomian yang Representative	1 Laporan	125.000.000	-	pada perubahan renstra judul keg ini dirubah menjadi Monitoring dan evaluasi Perindustrian dan Perdagangan di Prov.Kep.Babel	1 Laporan	125.000.000
3	37	20	1	Monitoring pengawasan supplay dan demand barang dan jasa di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Provinsi, SKPD	Jumlah data Peredaran barang dan jasa	1 laporan	0	-		1 laporan	101.000.000
3	37	20	2	Koordinasi Pengawasan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Luar Daerah, Provinsi, SKPD	Jumlah Rekomendasi Pengendalian Inflasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	2 Rekomendasi	200.000.000	-		3 Rekomendasi	320.000.000
3	37	20	5	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Koperasi dan UKM di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Luar Daerah, Provinsi, SKPD	jumlah laporan pengendalian dan evaluasi Koperasi, UKM dan UMKM di Prov.Kep.Babel	1 Laporan	125.000.000	-		1 Laporan	130.000.000
3	37	20	8	Monitoring,Evaluasi Promosi potensi daerah (EXPO) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Provinsi, Luar Daerah, SKPD, Belitung	Jumlah data potensi investasi	1 Laporan	125.000.000	-		1 Laporan	230.000.000
3	37	20	9	Monitoring dan Evaluasi Analisis Ekonomi Makro di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Luar Daerah, Provinsi, SKPD	Jumlah Rekomendasi Makro dan Mikro Ekonomi	2 Rekomendasi	125.000.000	-		2 Rekomendasi	140.000.000
3	37	20	10	Koordinasi,Monitoring dan Evaluasi UMKM di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Luar Daerah, Provinsi, SKPD	jumlah laporan pengendalian dan evaluasi Koperasi, UKM dan UMKM di Prov.Kep.Babel	1 Laporan	125.000.000	-		1 Laporan	100.000.000

3	37	20	11	Forum Pengembangan Ekonomi	Luar Daerah, Provinsi, SKPD, Belitung	Jumlah Rekomendasi data perkembangan ekonomi daerah	3 rekomendasi	150.000.000	-		1 rekomendasi	220.000.000
3	37	21		<b>Program Peningkatan Koordinasi Kebijakan Sumber Daya Alam</b>		<b>Prosentase Koordinasi Kebijakan Sumber Daya Alam</b>	<b>100%</b>	<b>625.000.000</b>			100%	
3	37	21	2	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Distribusi Bahan Bakar Minyak dan Gas di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Luar Daerah, Provinsi, SKPD	Jumlah laporan Distribusi Bahan Bakar Minyak dan Gas	1 Laporan	125.000.000	-		1 Laporan	162.500.000
3	37	21	4	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Penataan serta Pengembangan Lahan Kritis di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Provinsi, Luar Daerah, SKPD	Jumlah Rekomendasi kebijakan kerjasama investasi pertambangan Timah dengan yang ditindaklanjuti	1 Rekomendasi	125.000.000	-		1 Rekomendasi	100.125.000
3	37	21	5	Monitoring dan evaluasi Perizinan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Provinsi, Luar Daerah, SKPD	Jumlah desa mandiri pangan yang terdata	1 Dokumen	125.000.000	-	Pada perubahan renstra judul keg ini drubah menjadi Koordinasi, monitoring dan evaluasi Program Desa mandiri Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	1 Dokumen	104.000.000
3	37	21	7	Monitoring, Evaluasi dan Koordinasi Komoditi Pangan	Provinsi, SKPD, Belitung	Jumlah laporan komoditi pangan	1 Laporan	125.000.000	-		1 Laporan	150.000.000
3	37	21	9	Monitoring dan Evaluasi Tim Terpadu Penanganan masalah Penambangan Timah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Provinsi, Luar Daerah, SKPD	Jumlah Laporan Rekomendasi penanganan masalah pertambangan timah	2 Rekomendasi	125.000.000	-		2 Rekomendasi	400.000.000

3	37	22		<b>Program Peningkatan Koordinasi Bumd, Penanaman Modal, Pariwisata dan Budaya</b>		<b>Prosentase Koordinasi Kebijakan BUMD, Penanaman Modal, Pariwisata dan Budaya</b>	<b>100%</b>	<b>1.150.000.000</b>			100%	
3	37	22	<b>2</b>	Pembentukan Bank Umum Syariah Bangka Belitung	Luar Daerah, Provinsi, SKPD	Jumlah kesepakatan bersama terbentuknya bank umum syariah Bangka Belitung	1 Kesepakatan	300.000.000	-		1 Kesepakatan	200.000.000
3	37	22	<b>3</b>	Koordinasi Program CSR di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Luar Daerah, Provinsi, SKPD, Belitung	Jumlah Rekomendasi/Kesepakatan Program CSR	3 Rekomendasi	250.000.000	-		3 Rekomendasi	200.000.000
3	37	22	<b>4</b>	Monitoring dan Evaluasi Penyertaan Modal di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Luar Daerah, Provinsi, SKPD	Jumlah laporan Penyertaan Modal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	1 Berkas	175.000.000	-		1 Berkas	220.000.000
3	37	22	<b>5</b>	Penyusunan Kebijakan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Provinsi, SKPD	Jumlah data Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata	7 Dokumen	0	-		7 Dokumen	340.000.000
3	37	22	<b>6</b>	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Kajian dan Penyusunan Perlindungan Benda Cagar Budaya atau Benda diduga cagar budaya	Luar Daerah, Provinsi, SKPD	jumlah BCB dan Benda diduga BCB yang dilindungi	1 Laporan	125.000.000	-	Pada Perubahan renstra judul keg ini menjadi Koordinasi Pemantauan dan Monev perlindungan Benda Cagar Budaya atau Benda yang diduga cagar budaya	1 Laporan	340.000.000



3	37	22	7	Kajian Strategis Destinasi Wisata Baru di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Luar Daerah, Provinsi, Pangkal Pinang, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur	Jumlah laporan pengembangan Destinasi wisata baru	1 Laporan	0	-	Pada perubahan renstra judul keg ini menjadi Monev destinasi wisata minat khusus di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	1 Laporan	140.000.000
3	37	22	8	Rakor Teknis Tata Kelola BUMD di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Luar Daerah, Provinsi, SKPD	Jumlah Dokumen tata laksana BUMD se-Provinsi Kep.Babel yang aktif	1 Berkas	300.000.000	-		1 Berkas	160.000.000
3	37	22	9	Penyusunan SOP BUMD di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Luar Daerah, Provinsi, SKPD	Jumlah dokumen laporan	1 dokumen	0	-	Pada Perubahan renstra judul keg ini menjadi Pengembangan Pembiayaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) se Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	1 dokumen	360.000.000

3	37	22	10	Pemetaan Potensi Investasi Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Luar Daerah, Provinsi, SKPD	Jumlah perizinan yang terdata di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	1 Laporan	0	-	Pada perubahan renstra judul keg ini menjadi Koordinasi dan Monitoring penyelenggaraan Pelayanan Perizinan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	1 Laporan	240.000.000
3	37	24		<b>Program Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan APBN</b>		<b>Prosentase Realisasi Keuangan dan Realisasi Fisik Penyelenggaraan Dana APBN di Provinsi dan Kabupaten/Kota</b>	<b>80%</b>	<b>400.000.000</b>			85%	
3	37	24	1	Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi Sistem e-Monev APBN	Luar Daerah, Provinsi, SKPD, Bangka Barat, Bangka Tengah, Bangka Selatan, Belitung, Pangkal Pinang, Belitung Timur, Bangka	Jumlah Aplikasi e-Monev APBN	1 Aplikasi	231.275.000	-		1 Aplikasi	429.852.588
3	37	24	2	Pembinaan dan Pengendalian Kegiatan Pembangunan yang bersumber dari APBN	Pangkal Pinang	Jumlah Laporan	2 Laporan	168.725.000	-		2 Laporan	280.444.479
3	37	24	3	Koordinasi Kebijakan APBN	Luar Daerah, Provinsi, SKPD, Bangka Tengah, Bangka Selatan, Belitung, Belitung Timur, Pangkal Pinang, Bangka, Bangka Barat	Draft Regulasi/Rekomendasi Evaluasi APBN	1 Dokumen	0	-		1 Dokumen	185.380.000
3	39			<b>Sekretariat Daerah</b>								
3	39	23		<b>Program Peningkatan Pelayanan Kehumasan, Dokumentasi, Publikasi Media dan IT</b>		<b>Persentase pemanfaatan media dan IT untuk layanan kehumasan, dokumentasi dan publikasi</b>	<b>85%</b>	<b>2.191.352.350</b>			90%	

3	39	23	1	Publikasi Media Massa / Cetak	Luar Daerah, Provinsi, SKPD, Pangkal Pinang, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur	Jumlah publikasi di media massa/cetak	154 Tayang	1.450.155.300	-		292 Tayang	2.578.875.000
3	39	23	2	Publikasi Media Elektronik/IT	Provinsi, SKPD, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur, Pangkal Pinang	Jumlah publikasi di media elektronik dan IT	120 Tayang	339.721.850	-		178 Tayang	527.189.630
3	39	23	3	Pendokumentasian dan Belanja Spanduk/Baleho	Provinsi, SKPD, Pangkal Pinang, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur	Jumlah publikasi media luar	30 Tayang	176.114.200	-		45 Tayang	300.034.517
3	39	23	4	Penerbitan Majalah / Buletin Pemerintah Provinsi	Provinsi, SKPD, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur, Pangkal Pinang	Jumlah Terbitan Majalah/Buletin Pemerintah Provinsi	4.200 Eksemplar	225.361.000	-		6.348 Eksemplar	435.168.492
3	39	23	5	Media Gathering	Provinsi, SKPD	Jumlah peserta media gathering dari media lokal dan nasional	0 Orang	0	-		40 Orang	60.024.250
3	39	23	6	Workshop Humas Bidang Media Elektronik dan IT	Provinsi, SKPD	Jumlah SDM yang memiliki kompetensi di bidang Media Elektronik dan IT	0 Orang	0	-		15 Orang	34.862.952
3	39	23	7	Workshop Bidang Kehumasan	Provinsi, SKPD	Jumlah SDM yang memiliki kompetensi di bidang Kehumasan	0 Orang	0	-		55 Orang	84.294.000
3	39	24		<b>Program Peningkatan Pelayanan Protokoler</b>		<b>Persentase agenda kepala daerah yang terlayani</b>	<b>85%</b>	<b>196.878.050</b>			90%	
3	39	24	1	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Provinsi, SKPD	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan	4.600 Buah	92.173.750	-		6.017 Buah	90.673.906
3	39	24	2	Workshop Bidang Keprotokolan	Luar Daerah, Provinsi, SKPD	Jumlah SDM yang memiliki kompetensi di bidang keprotokolan	60 Orang	104.704.300	-		80 Orang	225.072.558
3	39	24	3	Layanan Tamu Pemerintah dan Negara	Provinsi, SKPD	Jumlah layanan tamu pemerintah dan negara	200 Orang	0	-		496 Orang	97.410.986
3	39	24	4	Peningkatan Fungsi Keprotokolan	Provinsi, SKPD	Tersedianya IT untuk keprotokolan	18 Buah	0	-		1 Buah	172.500.000

3	39	25		<b>Program Peningkatan Publikasi, Pengumpulan dan Penyaringan Informasi</b>		<b>Persentase Pelayanan dan Penyampaian informasi kepada aparaturnya dan publik</b>	<b>85%</b>	<b>1.345.251.350</b>			90%	
3	39	25	1	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Provinsi, SKPD	Tersedianya bahan bacaan untuk aparaturnya di sekretariat daerah	18.480 Eksemplar	225.346.200	-		31.247 Eksemplar	327.951.170
3	39	25	2	Pengumpulan, Penyaringan informasi dan Publikasi Kegiatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Dalam dan Luar Daerah di rubah menjadi Pengumpulan Informasi, Layanan Kehumasan, dan keprotokolan	Luar Daerah, Provinsi, SKPD, Pangkal Pinang, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur	Frekuensi Layanan Publikasi dan Keprotokolan Kegiatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Dalam dan luar Daerah	185 kali	249.538.000	-		331 kali	455.487.780
3	39	25	3	Penguatan Fungsi Pusat Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	Luar Daerah, Provinsi, SKPD, Belitung Timur, Pangkal Pinang, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung	Jumlah Ketersediaan informasi dan dokumentasi yang bisa diakses publik	23 PD	194.226.550	-		30 PD	417.290.276
3	39	25	4	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Layanan Kehumasan dan keprotokolan	Luar Daerah, Provinsi, SKPD, Pangkal Pinang, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur	Jumlah Ketersediaan Peralatan dan Perlengkapan Layanan Kehumasan dan Keprotokolan	4.010 Buah	676.140.600	-		7.218 Buah	910.975.691
3	39	25	5	Peningkatan Kualitas SDM dan Koordinasi Kehumasan dan Keprotokolan	Luar Daerah, Provinsi, SKPD	Jumlah SDM yang mengikuti kursus/pelatihan untuk meningkatkan kompetensi di luar daerah	3 Orang	0	-		8 Orang	45.509.076
3	39	25	6	Penyediaan Pakaian Khusus Lapangan Humas dan Protokol	Provinsi, SKPD	Jumlah pakaian khusus lapangan	0 Stel	0	-		63 Stel	115.000.000
3	39	1		<b>Program Peningkatan Administrasi Kewilayahan</b>		<b>Persentase penyelesaian kasus tanah negara; Persentase bidang tanah pemerintah provinsi yang bersertifikat; persentase kasus sengketa batas wilayah administrasi yang diselesaikan</b>	<b>81.000.000 meter persegi;30 bidang;40 persentase</b>	<b>1.488.339.000</b>			85.000.000 meter persegi;40 bidang;60 persentase	

3	39	1	1	Kegiatan Perencanaan,Evaluasi dan Penyusunan Laporan Internal Biro Pemerintahan	Provinsi, Belitung, Belitung Timur, Pangkal Pinang, Bangka Selatan, Bangka, Bangka Tengah, Bangka Barat	terlaksananya monitoring dan evaluasi pengaduan sengketa pertanahan di kabupaten/kota se- Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	6 pengaduan	37.000.000	-	Pada perubahan restra judul kegiatan ini berubah menjadi Monitoring dan Evaluasi Layanan Administrasi Pemerintahan di Kecamatan/ kelurahan yang bersumber dari bantuan serta menggabungkan kegiatan penyusunan sistem informasi data administrasi kewilayahan (SIDAK)	6 pengaduan	85.300.000
3	39	1	2	Kegiatan Pensertifikatan Tanah Milik Pemerintah Prov. Kep. Bangka Belitung	Provinsi, Belitung Timur, Pangkal Pinang, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah	terlaksananya proses sertifikasi tanah / terlaksananya penanganan komplik pertanahan	0 Bidang - orang	300.000.000	-		6 Bidang - orang	124.260.000
3	39	1	3	Kegiatan Pembinaan Penanganan Masalah Konflik Pertanahan di Prov. Kep. Bangka Belitung	Provinsi, Pangkal Pinang, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur	Jumlah penyelesaian sengketa batas daerah antar Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	1 sengketa batas administrasi wilayah	300.000.000	-	Pada perubahan Renstra judul kegiatan ini berubah menjadi Penyusunan Sistem Informasi Data Administrasi Kewilayahan (SIDAK)	1 sengketa batas administrasi wilayah	113.500.000

3	39	1	4	Kegiatan Penyusunan Sistem Informasi Data Administrasi Kewilayahan	Provinsi, Pangkal Pinang, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur	Jumlah Kabupaten yang terinventarisir	0 Kabupaten	168.700.000	-	Pada perubahan Renstra kegiatan ini berubah menjadi Kegiatan Perencanaan, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Internal biro Pemerintahan	0 Kabupaten	165.300.000
3	39	1	5	Kegiatan Inventarisasi dan Pemutakhiran Data Rupabumi	Provinsi, Belitung Timur, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung	Jumlah segmen batas daerah yang diinventarisir dan dipelihara	30 segmen batas	164.975.000	-	Pada perubahan renstra judul kegiatan ini dirubah menjadi Inventarisasi dan Pemuktahiran Data Rupabumi	30 segmen batas	110.250.000
3	39	1	6	Kegiatan Penegasan Batas Daerah	Provinsi, Belitung, Belitung Timur	Jumlah pilar batas daerah yang terpasang	10 pilar batas	517.664.000	-	Pada perubahan Renstra judul kegiatan ini dirubah menjadi Penegasan Batas Daerah	10 pilar batas	137.300.000

3	39	2		<b>Program Pengembangan Otonomi Daerah</b>		<b>Peringkat penilaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan provinsi ; Persentase kebijakan yang diterbitkan dalam rangka harmonisasi dan efektifnya pembagian urusan penyelenggaraan pemerintahan; Jumlah kepala daerah dan anggota legislative yang terfasilitasi secara administrasi; Peningkatan kapasitas kelembagaan untuk menciptakan kepuasan masyarakat atas layanan-layanan publik</b>	<b>13 peringkat;15 Prosentase ;20 %;90 %</b>	<b>2.219.490.500</b>			<b>11 peringkat;20 Prosentase;20 %;90 %</b>	
3	39	2	<b>1</b>	Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)	Provinsi, Luar Daerah, SKPD, Belitung, Belitung Timur, Pangkal Pinang, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah	Tersusunnya dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)	1 Dokumen	232.387.500	-		1 Dokumen	347.905.000
3	39	2	<b>2</b>	Kegiatan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Luar Daerah, Provinsi, Bangka, Bangka Barat, Pangkal Pinang, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur	Tersusunnya dokumen EKPPD Kabupaten/Kota di Provinsi Kep. Bangka Belitung	7 dokumen	327.100.000	-		7 dokumen	490.000.000
3	39	2	<b>3</b>	Kegiatan Pemantauan Pelaksanaan Pemilihan Legislative dan Pilpres 2019	Luar Daerah, Provinsi, Pangkal Pinang, Bangka, Bangka Selatan, Bangka Barat, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur	Jumlah Kabupaten/Kota yang terfasilitasi pelaksanaan Pilkada Provinsi/Kabupaten/Kota di Provinsi Kep. Bangka Belitung	0 Provinsi/Kabupaten/Kota	189.950.000	-	nama kegiatan awal desk pilkada di provinsi kepulauan bangka belitung	4 Provinsi/Kabupaten/Kota	275.100.000
3	39	2	<b>4</b>	Kegiatan Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan KDH dan WKDH	Provinsi, Luar Daerah, Pangkal Pinang, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur	Terselenggaranya Pelantikan KDH dan WKDH Provinsi/Kabupaten/Kota	0 kali	0	-		4 kali	220.000.000

3	39	2	5	Kegiatan Verifikasi Berkas Calon Anggota DPRD Prov. Kep. Bangka Belitung dan Calon Anggota DPRD Kab/Kota se-Prov. Kep. Bangka Belitung	Provinsi, Luar Daerah, Belitung, Belitung Timur, Pangkal Pinang, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah	Jumlah berkas calon anggota DPRD Provinsi/Kab/Kota. yang di verifikasi	235 berkas	226.200.000	-	nama kegiatan awal Implementasi Proses Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Provinsi/Kab/Kota	235 berkas	165.375.000
3	39	2	6	Pelayanan Perizinan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah serta Ketua/Anggota DPRD Prov. Kep. Bangka Belitung ke Luar Negeri	Provinsi, Luar Daerah	Jumlah izin keluar negeri yang dikeluarkan	10 surat izin	206.980.000	-		10 surat izin	165.375.000
3	39	2	7	Kegiatan Workshop Penataan dan Optimalisasi Penyelenggaraan Otonomi Daerah di Prov. Kep. Bangka Belitung	Luar Daerah, Provinsi, Pangkal Pinang, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan	Jumlah urusan kewenangan yang sinergi dengan baik	7 urusan	0	-	pada renstra perubahan judul kegiatan ini menjadi workshop penataan dan optimalisasi penyelenggaraan otonomi daerah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	7 urusan	241.100.000
3	39	2	8	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Indikator Kinerja Kunci, serta Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2017	Luar Daerah, Provinsi, SKPD, Belitung, Belitung Timur, Pangkal Pinang, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah	Tersusunnya dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK)	1 dokumen	441.978.000	-		1 dokumen	386.500.000



3	39	2	9	Kegiatan Optimalisasi Penerapan dan Pelaporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Prov. Kep. Bangka Belitung	Provinsi, Luar Daerah, SKPD, Belitung Timur, Pangkal Pinang, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung	Jumlah SPM yang diterapkan secara optimal	6 SPM	327.925.000	-	pada rensra perubahan judul kegiatan ini diubah menjadi optimalisasi penerapan dan pelaporan standar pelayanan minimal (SPM) Provinsi kepulauan Bangka Belitung	6 SPM	241.100.000
3	39	2	10	Kegiatan Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Prov. Kep. Bangka Belitung	SKPD	Terlaksananya penyelenggaraan urusan pemerintahan yang sama	6 Dokumen	266.970.000	-		6 Dokumen	110.250.000
3	39	3		<b>Program Pengembangan Kerja Sama Pemerintah Daerah</b>		<b>Meningkatnya koordinasi hubungan kepala daerah di Prov. Kep. Bangka Belitung; Meningkatkan jumlah kerjasama antar pemerintah daerah, swasta dan luar negeri</b>	<b>90 %;90 %</b>	<b>2.256.801.000</b>			90 %;90 %	
3	39	3	1	Rapat Koordinasi Gubernur dengan Bupati/Walikota se- Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Provinsi	Terlaksananya Rapat Koordinasi antara Gubernur dengan Bupati dan Walikota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	2 Kali	619.758.000	-		2 Kali	401.508.000
3	39	3	2	Kegiatan Partisipasi Kontribusi Iuran dan Keikutsertaan dalam Rakor/Rakernas APPSI	SKPD	Terlaksananya keikutsertaan Provinsi dalam APPSI	1 Kali	266.722.000	-		1 Kali	241.980.000
3	39	3	3	Kegiatan Partisipasi Kontribusi Iuran dan Keikutsertaan dalam Rapat Kerja BKS Provinsi Kepulauan	SKPD	Terlaksananya keikutsertaan dalam BKS Provinsi Kepulauan	1 Kali	242.251.000	-		1 Kali	273.290.000

3	39	3	4	Kegiatan Verifikasi dan Validasi bantuan pemerintah provinsi kepada Pemerintah/pemerintahan daerah lainnya dan BUMD	Provinsi	Jumlah proposal bantuan hibah yang diverifikasi	4 proposal bantuan	78.070.000	-		4 proposal bantuan	82.560.000
3	39	3	5	Kegiatan Pengembangan Kesepakatan dan Perjanjian Kerjasama	Provinsi	jumlah rekomendasi kerjasama/perjanjian	10 rekomendasi	250.000.000	-		10 rekomendasi	151.631.000
3	39	3	6	Kegiatan Inventarisasi potensi kerjasama	Provinsi	Prosentase Terlaksananya inventarisasi potensi daerah yang dapat dikerjasamakan oleh perangkat daerah	100%	500.000.000	-		100%	125.342.000
3	39	3	7	Kegiatan Penyelarasan program pemerintah daerah dan pusat	Provinsi	Pelaksanaan penyelarasan program pemerintah daerah dan pusat	1 kali pertemuan	300.000.000	-		1 kali pertemuan	450.000.000
3	39	4		<b>Program Peningkatan Pembinaan Keagamaan</b>		<b>Prosentase pembinaan keagamaan</b>	<b>100 persen</b>	<b>8.580.920.800</b>			100 persen	
3	39	4	1	Pembinaan Mental dan Spritual Masyarakat provinsi Kep.Bangka Belitung	Provinsi	persentase pembinaan masyarakat	80%	954.880.800	-		80%	1.552.648.000
3	39	4	2	Peningkatan Kehidupan Beragama pada Bulan Ramadhan	Provinsi	Frekuensi Peyelenggaraan Safari Ramadhan	17 Masjid	580.456.500	-		17 Masjid	725.100.000
3	39	4	3	Penyelenggaraan Pemberangkatan dan Pemulangan Jamaah Haji	Provinsi	Jumlah Jemaah haji yang diberangkatan	1.100 jemaah/orang	900.645.000	-		1.100 jemaah/orang	1.048.600.000
3	39	4	4	Pendampingan Jamaah Haji Prov. Kep. Bangka Belitung	Provinsi	Terseleksinya Petugas Haji Daerah TPHD/TKHD	7 orang	450.680.500	-		7 orang	604.080.000
3	39	4	5	Pembiayaan Transportasi Domestik Jemaah Haji	Provinsi	Jumlah Jamaah yang Terfasilitasi Biaya Domestik Haji	1.100 orang	3.168.736.000	-		1.100 orang	3.300.000.000
3	39	4	8	Pembinaan dan Pemberangkatan Khafilah STQ Nasional	Pangkal Pinang	Jumlah Khafilah yang mengikuti STQ	30 orang	991.657.000	-		30 orang	1.556.600.000
3	39	4	9	Pekan Olah Raga dan Seni antar Pondok Pesantren Tingkat Daerah Prov. Kep. Babel	Provinsi, SKPD			534.965.000	-			0
3	39	4	10	Pembinaan dan Pemberangkatan Kontingen POSPENAS	Luar Daerah, Provinsi, SKPD			998.900.000	-			0

3	39	5		<b>Program Peningkatan Koordinasi Kebijakan Pendidikan, KB, Pemuda dan Pariwisata</b>		<b>prosentase pengembangan pendidikan, keluarga berencana, pemuda dan pariwisata</b>	<b>100 persen</b>	<b>1.099.120.500</b>			100 persen	
3	39	5	1	Pelaksanaan Kegiatan TP UKS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Provinsi	Jumlah Sekolah yang dinilai	28 sekolah	369.120.500	-		28 sekolah	434.090.000
3	39	5	2	Peningkatan Kecintaan Bermasyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Provinsi	Jumlah Partisipasi Acara HUT Bangka Belitung	3.000 orang	730.000.000	-		3.000 orang	1.146.630.000
3	39	6		<b>Program Peningkatan Koordinasi Kebijakan Sosial, Kesehatan, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi</b>		<b>Prosentase koordinasi kebijakan sosial, kesehatan, tenaga kerja dan transmigrasi</b>	<b>100 persen</b>	<b>483.667.600</b>			100 persen	
3	39	6	1	Rapat Bagian Sosial, Kesehatan, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi	Provinsi	terlaksannya pelayanan yang optimal kepada masyarakat	21 Rekomendasi	125.000.000	-	pada perubahan renstra judul kegiatan ini berubah menjadi Rakor Bidang Bansos dan Hibah	21 Rekomendasi	480.233.000
3	39	6	2	Monitoring dan evaluasi dana bantuan sosial dan hibah	Provinsi	Meningkatnya kegiatan monitoring dan evaluasi bansos dan hibah	200 Proposal	200.495.000	-		200 Proposal	433.985.000
3	39	6	3	Evaluasi dan Analisi Proposal Bansos dan Hibah	Provinsi	Terlaksananya Evaluasi dan Analisis Proposal Bansos dan Hibah	500 proposal	158.172.600	-		500 proposal	303.204.000
3	39	7		<b>Program Peningkatan Penataan Peraturan Perundang-Undangan</b>		<b>Persentase penataan Peraturan Perundang-undangan</b>	<b>85%</b>	<b>1.964.000.000</b>			90%	
3	39	7	1	Penyusunan Propemperda Dan Rancangan Peraturan Daerah	Provinsi	Jumlah Usulan Propemperda yang selesai disusun	1 Usulan Propemperda	800.000.000	Pendapatan Daerah		1 Usulan Propemperda	1.550.000.000

						Jumlah Rancangan Peraturan Daerah yang selesai disusun	10 Raperda					12 Raperda	
3	39	7	2	Penyusunan Produk Hukum Daerah	Provinsi, Luar Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah (PHD) yang selesai disusun	70 Pergub	684.000.000	Pendap atan Daerah			70 Pergub	600.000.000
						Jumlah Produk Hukum Daerah (PHD) yang selesai disusun	900 Kepgub					900 Kepgub	
3	39	7	3	Penyusunan Naskah Hukum Lainnya	Provinsi, Luar Daerah, Pangkal Pinang, Bangka Tengah, Belitung, Bangka, Bangka Barat, Belitung Timur, Bangka Selatan	Jumlah Naskah Hukum Lainnya (NHL) yang selesai disusun	100 NHL	80.000.000	Pendap atan Daerah			100 NHL	170.000.000
3	39	7	4	Evaluasi Raperda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota	Provinsi, Luar Daerah, Belitung, Belitung Timur, Bangka, Pangkal Pinang, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah	Jumlah Raperda Kabupaten/Kota yang selesai dievaluasi	12 Raperda	400.000.000	Pendap atan Daerah			12 Raperda	430.000.000
3	39	8		<b>Program Peningkatan Pelayanan Hukum Pemerintah Daerah</b>		<b>Persentase Pelayanan Hukum</b>	<b>85%</b>	<b>780.000.000</b>				90%	
3	39	8	1	Penyelesaian Perselisihan/Sengketa Perdata antara Pemda dengan Orang/Masyarakat secara Litigasi atau Non Litigasi	Provinsi, Belitung, Belitung Timur, Pangkal Pinang, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah	Jumlah Kasus Sengketa Perdata yang melalui tahapan proses penyelesaian	2 Kasus	190.000.000	Pendap atan Daerah			1 Kasus	320.000.000
3	39	8	2	Penyelesaian Sengketa TUN akibat Pelaksanaan Produk Hukum dan Kebijakan Pemda	Provinsi, Luar Daerah	Jumlah Kasus Sengketa TUN yang melalui tahapan proses penyelesaian	2 Kasus	200.000.000	Pendap atan Daerah			1 Kasus	320.000.000
3	39	8	3	Pembinaan Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Akibat Pelaksanaan Produk Hukum Daerah dan Kebijakan Pemda di Kab/Kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Luar Daerah, Provinsi, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur, Pangkal Pinang, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan	Jumlah Laporan Pembinaan Penyelesaian Sengketa Kabupaten/Kota	1 Laporan	110.000.000	Pendap atan Daerah			1 Laporan	170.000.000
3	39	8	4	Pembinaan Pelaksanaan RANHAM di Kab/Kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Provinsi, Luar Daerah, Belitung, Belitung Timur, Pangkal Pinang, Bangka, Bangka Barat, Bangka Tengah, Bangka Selatan	Jumlah Laporan Pembinaan Pelaksanaan Rencana Hak Asasi Manusia (HAM) di Provinsi dan Kabupaten/Kota	4 Laporan	110.000.000	-			4 Laporan	240.000.000

3	39	8	5	Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin oleh Lembaga Bantuan Hukum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Provinsi, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Bangka, Belitung Timur, Pangkal Pinang	Jumlah masyarakat miskin yang diberikan bantuan hukum	40 Orang	170.000.000	Pendapatan Daerah		45 Orang	260.000.000
3	39	8	6	Penyuluhan Hukum di 7 Wilayah Kabupaten/Kota	Provinsi, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur, Pangkal Pinang	Jumlah orang yang diberikan penyuluhan hukum	310 Orang	0	Pendapatan Daerah		350 Orang	370.000.000
3	39	9		<b>Program Pengembangan Dokumentasi Hukum Dan Informasi Hukum</b>		<b>Persentase Pengembangan Dokumentasi Hukum dan Informasi Hukum</b>	<b>85%</b>	<b>496.628.400</b>			90%	
3	39	9	1	Pengelolaan dan Pengembangan JDIH	Provinsi, Luar Daerah, Belitung, Belitung Timur, Bangka, Pangkal Pinang, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah	Jumlah Peraturan Perundang-undangan yang dipublikasi melalui website JDIH	80 Peraturan	281.628.400	Pendapatan Daerah		100 Peraturan	650.000.000
						Jumlah artikel yang dipublikasi melalui website JDIH	50 Artikel				120 Artikel	
3	39	9	3	Penyusunan Katalog Perda dan Pergub dan Kompilasi Perda dan Pergub	Provinsi, Belitung Timur, Pangkal Pinang, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung	Jumlah Buku Kompilasi dan Katalog Perda/Pergub yang tersedia	150 Buku	75.000.000	Pendapatan Daerah		150 Buku	90.000.000
3	39	9	5	Rakor Biro Hukum dan Bagian Hukum Kabupaten/Kota Se- Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Provinsi, Luar Daerah, Belitung Timur, Pangkal Pinang, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung	Jumlah Rekomendasi Pembangunan di Bidang Hukum	1 Rekomendasi	140.000.000	Pendapatan Daerah		1 Rekomendasi	190.000.000
3	39	13		<b>Program Perencanaan Setda</b>		<b>Persentase Dokumen Keuangan dan Laporan Kinerja meningkat</b>	<b>80%</b>	<b>170.297.500</b>			85%	
3	39	13	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Luar Daerah, Provinsi, SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan	4 Dokumen	89.710.000	-		4 Dokumen	150.000.000
3	39	13	2	Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Sekretariat Daerah	Luar Daerah, Provinsi, SKPD	Jumlah Laporan	4 Laporan	80.587.500	-		4 Laporan	259.558.450

3	39	15		<b>Program Pengendalian Pembangunan Daerah</b>		<b>Prosentase Realisasi Keuangan dan Realisasi Fisik Penyelenggaraan Dana APBD di Provinsi dan Kabupaten/Kota</b>	<b>95%</b>	<b>288.784.300</b>			97%	
3	39	15	1	Pengendalian Percepatan Pembangunan di Provinsi Kabupaten/Kota	Belitung Timur, Pangkal Pinang	Jumlah Laporan Koordinasi Sinkronisasi Pengendalian Percepatan Pembangunan di Provinsi Kabupaten/Kota	1 Laporan	288.784.300	-		1 Laporan	437.517.500
3	39	15	2	Peningkatan Fungsi Sistem Monitoring TEPR (SISMONTEP) Provinsi Kabupaten/Kota	Provinsi	Jumlah Laporan Koordinasi Sistem Monitoring TEPR (SISMONTEP) Provinsi Kabupaten/Kota	4 Laporan	0	-		4 Laporan	761.802.097
3	39	15	4	Peningkatan Pengendalian Pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Provinsi	Jumlah Kesepakatan Rencana Tindak Lanjut (RTL)	1 Dokumen	0	-		1 Dokumen	381.529.750
3	39	16		<b>Program Monitoring Dan Evaluasi Pelaksanaan Apbd</b>		<b>Persentase Realisasi Program dan Kegiatan APBD Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung</b>	<b>85%</b>	<b>680.370.000</b>			90%	
3	39	16	1	Peningkatan Fungsi Sistem E-Monev APBD	Pangkal Pinang	Jumlah Laporan Koordinasi Sistem E-Monev	1 Laporan	150.000.000	-		1 Laporan	627.328.194
3	39	16	3	Kebijakan Monitoring Evaluasi APBD	Provinsi, SKPD, Pangkal Pinang	Jumlah Laporan dan Rekomendasi	1 Laporan	104.750.000	-		1 Laporan	175.547.500
3	39	16	6	Peningkatan Capaian Realisasi APBD	Pangkal Pinang	Rekomendasi APBD	1 Rekomendasi	225.620.000	-		1 Rekomendasi	0
3	39	16	7	Peningkatan Fungsi Sismontep APBD Provinsi, Kab/Kota	Provinsi, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung Timur, Belitung, Pangkal Pinang	Jumlah Rekomendasi dan Laporan	1 laporan	200.000.000	-		1 laporan	287.281.500

3	39	17		<b>Program Pengembangan Data Informasi Layanan Pengadaan</b>		<b>Persentase data dan informasi pengadaan barang/jasa yang dikelola dan dipublikasikan berbasis IT; Survey kepuasan masyarakat terhadap pengembangan data informasi layanan pengadaan</b>	<b>92 persen;80 Nilai indeks Kepuasan</b>	<b>664.483.000</b>			94 persen;80 Nilai indeks Kepuasan	
3	39	17	<b>1</b>	Peningkatan penerapan data dan informasi layanan	Luar Daerah, Provinsi	Jumlah penerapan aplikasi sistem informasi pengadaan barang/jasa	1 Aplikasi	89.450.000	-		1 Aplikasi	100.000.000
3	39	17	<b>2</b>	Pengelolaan data dan informasi	Luar Daerah, Provinsi, SKPD	Jumlah Admin OPD sistem informasi pengadaan	42 Admin	428.678.000	-		42 Admin	284.955.000
3	39	17	<b>3</b>	Peningkatan Administrasi Ketatausahaan	Luar Daerah, Provinsi, SKPD	Jumlah Dokumen dukungan data perencanaan, pelaporan dan ketatausahaan	8 Dokumen	97.680.000	-		8 Dokumen	452.358.500
3	39	17	<b>4</b>	Peningkatan Pelayanan Publik	Provinsi, Luar Daerah, SKPD	Jumlah SOP dan Penerapannya	1 Dokumen	48.675.000	-		1 Dokumen	55.000.000
3	39	18		<b>Program Peningkatan Layanan Pengadaan Barang Dan Jasa</b>		<b>Persentase RPP siap lelang yang selesai ditangani ULP; Survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pengadaan Barang dan Jasa</b>	<b>92 persen;80 Nilai Indeks Kepuasan</b>	<b>2.223.288.000</b>			94 persen;80 Nilai Indeks Kepuasan	
3	39	18	<b>1</b>	Peningkatan Fungsi Pelayanan ULP	Provinsi, Luar Daerah, SKPD	Jumlah Bulan Layanan Pengadaan oleh ULP	12 Bulan	1.986.928.000	-		12 Bulan	3.894.264.000
3	39	18	<b>2</b>	Peningkatan Pembinaan Pengadaan barang dan Jasa	Luar Daerah, Provinsi, SKPD, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur, Pangkal Pinang	Frekuensi Pelatihan / Pembinaan / bimtek / Pendampingan	3 kali	158.208.000	-		3 kali	544.971.900

3	39	18	3	Peningkatan pelayanan perencanaan Pengadaan barang dan jasa	Luar Daerah, Provinsi, SKPD, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur, Pangkal Pinang, Bangka, Bangka Barat	Jumlah Pendampingan dan Monev Pengadaan	2 Kali	0	-		2 Kali	445.376.800
3	39	18	4	Pencegahan dan Penanganan Pengaduan	Luar Daerah, Provinsi, SKPD, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur, Pangkal Pinang	Frekuensi Sosialisasi Pencegahan dan Pengaduan	2 kali	78.152.000	-		2 kali	653.412.100
3	39	19		<b>Program Peningkatan Layanan Pengadaan Secara Elektronik</b>		<b>Persentase Penggunaan e - Procrument terhadap belanja pengadaan; Survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pengadaan secara elektronik</b>	<b>92 persen;80 Nilai Indeks Kepuasan</b>	<b>3.207.970.000</b>			94 persen;80 Nilai Indeks Kepuasan	
3	39	19	1	Peningkatan Fungsi Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Luar Daerah, Provinsi, SKPD	Jumlah Bulan Layanan oleh LPSE	12 Bulan	1.701.624.000	-		12 Bulan	2.327.749.600
3	39	19	2	Peningkatan Layanan dan Dukungan Pengadaan Secara Elektronik	Luar Daerah, Provinsi, SKPD, Belitung, Belitung Timur, Pangkal Pinang, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah	Jumlah Penerapan aplikasi pendukung SPSE	2 Aplikasi	485.596.000	-		2 Aplikasi	1.059.106.950
3	39	19	3	Peningkatan Pelayanan dan Registrasi dan Verifikasi	Luar Daerah, Provinsi, SKPD, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur, Pangkal Pinang	Jumlah Penerapan aplikasi pendukung SPSE	1 Aplikasi	246.400.000	-		1 Aplikasi	271.040.000
3	39	19	4	Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	Luar Daerah, Provinsi, SKPD	Jumlah Penerapan aplikasi Penyedia Barang/Jasa	12 Bulan	774.350.000	-		12 Bulan	1.275.158.500



3	39	20		<b>Program Peningkatan Dan Pengembangan Kelembagaan Serta Analisis Jabatan</b>		Persentase organisasi perangkat daerah yang tepat fungsi dan ukuran kelembagaannya; Persentase ASN memahami dan mengimplementasikan analisa jabatan, analisa beban kerja, peta jabatan dan standar kompetensi teknis; Persentase jumlah pejabat struktural ASN yang memahami dan mengimplementasikan uraian tugas dan fungsi; Persentase jumlah OPD provinsi, kabupaten, kota yang efektif dan efisien	75 %;80 %;80 %;75 %	1.005.490.000			80 %;85 %;85 %;80 %	
3	39	20	0	Evaluasi Kelembagaan UPT/Cabdin Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Provinsi	Jumlah dokumen pembinaan 40 PD di lingkungan pemerintah provinsi kepulauan bangka belitung	1 Dokumen	135.340.000	-	pada perubahan renstra judul kegiatan ini berubah menjadi evaluasi kelembagaan UPT/cabdin Pemerintah provinsi Kepulauan Bangka Belitung	1 Dokumen	142.670.000

3	39	20	2	Pembinaan dan pengendalian kelembagaan perangkat daerah kabupaten/kota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Provinsi	Jumlah laporan pembinaan kelembagaan	1 laporan	130.580.000	-	pada perubahan renstra judul kegiatan ini berubah menjadi Pembinaan dan pengendalian kelembagaan perangkat daerah kabupaten/kota se-provinsi kep bangka belitung	1 laporan	180.000.000
3	39	20	4	Penataan perangkat daerah pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Luar Daerah, Provinsi, SKPD, Belitung, Belitung Timur, Pangkal Pinang, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah	Jumlah dokumen laporan pembinaan	1 Dokumen	115.010.000	-	pada perubahan renstra judul kegiatan ini berubah menjadi Penataan perangkat daerah pemerintah provinsi kep bangka belitung	1 Dokumen	175.000.000

3	39	20	5	Validasi analisis jabatan dan analisis beban kerja Perangkat Daerah Provinsi Bangka Belitung	Provinsi, Luar Daerah, SKPD, Pangkal Pinang, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur	Jumlah dokumen analisa jabatan	2 Dokumen	267.210.000	-	pada perubahan renstra judul kegiatan ini berubah menjadi Validasi analisis jabatan dan analisa beban kerja perangkat daerah prov. bangka belitung	2 Dokumen	170.000.000
3	39	20	6	Validasi standar kompetensi jabatan aparatur sipil negara pada perangkat daerah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Luar Daerah, Provinsi, SKPD, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur, Pangkal Pinang	Jumlah dokumen standar kompetensi teknis	1 Dokumen	201.150.000	-	pada perubahan renstra judul kegiatan ini berubah menjadi validasi standar kompetensi jabatan aparatur sipil negara pada perangkat daerah di provinsi kep bangka belitung	1 Dokumen	170.000.000

3	39	20	9	Validasi evaluasi jabatan pegawai negeri sipil pada satuan kerja perangkat daerah di lingkungan pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Provinsi	Jumlah dokumen Evaluasi jabatan	1 dokumen	156.200.000	-	pada perubahan restra judul kegiatan ini berubah menjadi validasi evaluasi jabatan pegawai negeri sipil pada satuan kerja perangkat daerah di lingkungan pemerintah provinsi kep bangka belitung	1 dokumen	230.000.000
3	39	21		<b>Program Peningkatan Dan Pengembangan Kinerja Pemerintah Daerah</b>		<b>Persentase peningkatan pengembangan kinerja ASN dan Pemerintah Daerah; Persentase peningkatan informasi data profil aparatur jabatan struktural propinsi kepulauan bangka belitung; Peningkatan nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah; Persentase kepatuhan penyampaian LHKPN</b>	<b>75 %;75 %;65 ;97 %</b>	<b>740.020.000</b>			80 %;80 %;67 ;99 %	
3	39	21	1	Penyusunan Profil Aparatur jabatan struktural	Luar Daerah, Provinsi, SKPD, Pangkal Pinang	Tersusunnya laporan profil aparatur	15 laporan	98.500.000	-		15 laporan	165.000.000

3	39	21	2	Forum Sekretaris Daerah Prov.babel	Luar Daerah, Provinsi, SKPD, Belitung, Belitung Timur, Pangkal Pinang, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah	jumlah dokumen kesepakatan	1 Dokumen	62.889.000	-		1 Dokumen	185.000.000
3	39	21	6	Bimbingan Teknis penyusunan Laporan kinerja, perjanjian kinerja dan rencana aksi kinerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Luar Daerah, Provinsi, SKPD, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur, Pangkal Pinang	Jumlah peserta	50 orang	180.305.000	-	pada perubahan renstra judul kegiatan ini berubah menjadi Bimtek AKIP provinsi kep bangka belitung	50 orang	225.000.000
3	39	21	9	Rapat koordinasi evaluasi capaian kinerja pemerintah daerah	Provinsi, Luar Daerah, SKPD, Belitung Timur, Pangkal Pinang, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung	Jumlah dokumen hasil/kesepakatan rakor	43 OPD	0	-	pada perubahan renstra judul kegiatan ini berubah menjadi Koordinasi Pelaksanaan RB Pemerintah provinsi kep bangka belitung	43 OPD	220.000.000
3	39	21	10	Penyusunan laporan kinerja tahunan dan perjanjian kinerja tahunan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Luar Daerah, Provinsi, SKPD, Belitung, Belitung Timur, Pangkal Pinang, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah	Jumlah laporan kinerja dan perjanjian kinerja tahunan	1 Dokumen	108.101.000	-		1 Dokumen	225.000.000

3	39	21	11	Penyusunan pedoman indikator kinerja utama	Luar Daerah, Provinsi, Belitung Timur, Pangkal Pinang, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung	Jumlah Laporan kinerja provinsi	1 Laporan	0	-	pada perubahan renstra judul kegiatan ini berubah menjadi Penyusunan penetapan Kinerja dan laporan Kinerja Instansi pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	1 Laporan	0
3	39	21	12	Penyusunan Pedoman Pengembangan Penerapan Budaya Kerja ASN	Luar Daerah, Provinsi, SKPD, Belitung, Belitung Timur, Pangkal Pinang, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah	Jumlah rakor, bimbingan teknis dan pergub pedoman penerapan budaya kerja ASN dan Monev	1 laporan/per gub/buku	0	-		50 laporan/pergub/buku	275.000.000
3	39	21	14	Penyusunan standar capaian kinerja individu ASN	Luar Daerah, Provinsi, SKPD, Belitung Timur, Pangkal Pinang, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung	Jumlah OPD yang dibina	43 OPD	145.050.000	-	pada perubahan renstra judul kegiatan ini berubah menjadi Penyusunan Standar Capaian Kinerja Pemerintah daerah	43 OPD	275.000.000
3	39	21	16	Pembinaan standar manajemen mutu pada OPD, Cabdin dan UPT di lingkungan pemerintah provinsi kepulauan bangka belitung	Luar Daerah, Provinsi, SKPD, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur, Pangkal Pinang	Jumlah laporan	1 laporan	80.900.000	-		1 laporan	275.000.000
3	39	21	18	Pembinaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Luar Daerah, Provinsi, SKPD, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur, Pangkal Pinang	Jumlah laporan	1 laporan	64.275.000	-		1 laporan	140.000.000

3	39	22		<b>Program Peningkatan Dan Pengembangan Tata Laksana Pemerintah Daerah</b>		<b>Peningkatan kepuasan masyarakat; Peningkatan kinerja sumber daya aparatur</b>	<b>0 ;55 %</b>	<b>1.421.540.000</b>			<b>0 ;60 %</b>	
3	39	22	1	Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Luar Daerah, Provinsi, SKPD, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur, Pangkal Pinang, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan	Jumlah laporan pembinaan pelaksanaan SOP	1 laporan	176.000.000	-		1 laporan	190.000.000
3	39	22	1	Pembinaan pelaksanaan pelayanan publik di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Luar Daerah, Provinsi, SKPD, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur, Pangkal Pinang, Bangka	Laporan pembinaan pelaksanaan pelayanan publik	1 Laporan	170.000.000	-		1 Laporan	200.000.000
3	39	22	2	Rapat koordinasi Biro/Bagian Organisasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Luar Daerah, Provinsi, SKPD, Belitung Timur, Pangkal Pinang, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung	Dokumen kesepakatan Biro/Bagian Organisasi	1 Dokumen	102.230.000	-		1 Dokumen	190.000.000
3	39	22	4	Peningkatan administrasi ketatausahaan	Luar Daerah, Provinsi, SKPD, Belitung Timur, Pangkal Pinang, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung	Jumlah laporan dukungan data perencanaan, pelaporan dan ketatausahaan	1 laporan	162.000.000	-	Kegiatan pengganti [enyelenggara standar pelayanan minimal di Provinsi Kepulauan bangka Belitung. karena kegiatan tersebut pada saat ini menjadi tupoksi biro pemerintah n (tidak ada di renstra)	1 laporan	300.000.000

3	39	22	6	Bimtek penyusunan proposal dan pelatihan admin kompetisi inovasi pelayanan publik	Luar Daerah, Provinsi, SKPD, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur, Pangkal Pinang	Jumlah Kegiatan Bimtek	1 Kegiatan	114.900.000	-	perubahan renstra	1 Kegiatan	300.000.000
3	39	22	7	Audit Surveillance ISO 9001:2008 menuju Sertifikasi ISO 9001:2015 untuk Samsat Sungailiat dan UPTSP	Luar Daerah, Provinsi, SKPD, Belitung Timur, Pangkal Pinang, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung	Ketetapan atas ISO 9001 : 2008	1 Dokumen	211.220.000	-	pada perubahan renstra judul kegiatan ini berubah menjadi audit pengawasan (survilance audit) sertifikasi SMM ISO 9001:2008 menuju sertifikasi ISO M9001:2015 pada UPTSP DPMPTSP dan UPT DPPKAD Provinsi Kep.Babel Wilayah Kabupaten Bangka (Samsat Bangka)	1 Dokumen	200.000.000
3	39	22	8	Peningkatan Pelaksanaan reformasi birokrasi pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Luar Daerah, Provinsi, SKPD, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur, Pangkal Pinang, Bangka, Bangka Barat	Jumlah dokumen laporan pelaksanaan RB	1 dokumen	211.440.000	-		1 dokumen	200.000.000
3	39	22	10	Roadmap Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Provinsi, Luar Daerah, SKPD, Pangkal Pinang, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur	dokumen reformasi birokrasi	1 Dokumen	121.750.000	-	perubahan output	1 Dokumen	290.000.000



3	39	22	15	Pelaksanaan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Luar Daerah, Provinsi, SKPD, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur, Pangkal Pinang, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan	Jumlah dokumen terkait kepuasan masyarakat	1 dokumen	152.000.000	-		1 dokumen	165.000.000
						TOTAL		73.160.314.510				104.501.265.760

RENCANA AKSI KINERJA  
SEKRETARIAT DAERAH  
TAHUN 2019

NOA5:M 1A5:M17	SASARAN				PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	DEFINISI OPERASIONAL INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	TARGET			
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	DEFINISI OPERASIONAL INDIKATOR	TARGET KINERJA					TW 1 :	TW 2 :	TW 3 :	TW 4 :
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
BIRO PEMERINTAHAN												
1	Terwujudnya penyusunan kebijakan penyelenggaraan pemerintah umum, pembangunan dan pelayanan publik yang tepat	Meningkatnya kualitas dan jumlah kebijakan dibidang otonomi daerah, administrasi kewilayahan dan kerjasama	Persentase uraian dalam LPPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang memiliki capaian kinerja dengan predikat tinggi	TW 1: 25 % TW 2 : 50 % TW 3 : 75 % TW 4 : 100 %	Program Pengembangan Otonomi Daerah	Persentase kebijakan yang diterbitkan dalam rangka harmonisasi dan efektifnya pembagian urusan penyelenggaraan pemerintahan	Jumlah kebijakan yang dicapai / kebijakan yang ditargetkan x 100 %	Persen ( % )	√	√	√	√
					Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)	Tersusunnya dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)	dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) yang dicapai / dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) yang ditargetkan x 100 %	1 Dokumen dan 57 orang	√	√	√	√
					Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Tersusunnya dokumen EKPPD Kabupaten/Kota di Provinsi Kep. Bangka Belitung	dokumen EKPPD Kabupaten/Kota di Provinsi Kep. Bangka Belitung yang dicapai /dokumen EKPPD Kabupaten/Kota di Provinsi Kep. Bangka Belitung yang ditargetkan x 100 %	7 Kabupaten/Kota			√	√
					Pelayanan Perizinan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah serta Ketua/Anggota DPRD Prov. Kep. Bangka Belitung ke Luar Negeri	Jumlah izin keluar negeri yang dikeluarkan	Jumlah izin keluar negeri yang dikeluarkan / Jumlah izin keluar negeri yang dikeluarkan sesuai target x 100 %	80 persen		√	√	√
					Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan/Kewenangan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Terlaksananya rapat penyelenggaraan urusan/kewenangan dan kebijakan otonomi daerah di Provinsi Kep, Bangka Belitung	Terlaksananya rapat penyelenggaraan urusan/kewenangan dan kebijakan otonomi daerah di Provinsi Kep, Bangka Belitung	50 orang			√	√
					Kegiatan Pemantauan Pelaksanaan Pemilihan Legislative dan Pilpres 2019	Jumlah Kabupaten/Kota yang terfasilitasi pelaksanaan Pilkada Provinsi/Kabupaten/Kota di Provinsi Kep. Bangka Belitung	Jumlah Kabupaten/Kota yang terfasilitasi pelaksanaan Pilkada Provinsi/Kabupaten/Kota di Provinsi Kep. Bangka Belitung yangdicapai / Kabupaten/Kota yang terfasilitasi pelaksanaan Pilkada Provinsi/Kabupaten/Kota di Provinsi Kep. Bangka Belitung x 100 %	7 Kabupaten/Kota		√	√	√
					Kegiatan Verifikasi Berkas Calon Anggota DPRD Prov. Kep. Bangka Belitung dan Calon Anggota DPRD Kab/Kota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Jumlah SK PAW anggota DPRD Provinsi/Kab/Kota.	Jumlah SK PAW anggota DPRD Provinsi/Kab/Kota yang dicapai / Jumlah SK PAW anggota DPRD Provinsi/Kab/Kota yang di targetkan x 100 %	80 persen	√	√	√	√
					Kegiatan Optimalisasi Penerapan dan Pelaporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Jumlah peserta rakor 50 orang	Jumlah peserta rakor 50 orang	50 orang	√	√	√	√

					Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Indikator Kinerja Kunci serta Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Tersusunnya dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK)	Tersusunnya dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang dicapai / dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) ditargetkan x 100 %	1 Dokumen dan 57 orang	√	√	√	√
2	Terwujudnya pengkoordinasian administrasi pelaksanaan tugas perangkat daerah yang efisien dan tepat	Meningkatnya pelaksanaan koordinasi administrasi wilayah	Presentase koordinasi administrasi kewilayahan yang dilaksanakan	TW 1: 25 % TW 2 : 50 % TW 3 : 75 % TW 4 : 100 %	Program Peningkatan Administrasi Kewilayahan	Persentase penyelesaian kasus tanah negara	Jumlah penyelesaian kasus tanah negara yang dicapai / penyelesaian kasus tanah negara yang ditargetkan x 100 %	Persen ( % )	√	√	√	√
					Kegiatan Pensertifikatan Tanah Milik Pemerintah Prov. Kep. Bangka Belitung	terlaksananya proses sertifikasi tanah milik Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	jumlah sertifikasi tanah milik Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang dicapai / jumlah sertifikasi tanah milik Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang ditargetkan x 100 %	20 bidang			√	√
					Kegiatan Perencanaan, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Internal Biro Pemerintahan	jumlah dokumen Laporan Internal Biro Pemerintahan	jumlah dokumen Laporan Internal Biro Pemerintahan	6 Dokumen	√	√	√	√
					Kegiatan Pembinaan Penanganan Masalah Konflik Pertanahan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Jumlah penyelesaian sengketa batas daerah antar Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Jumlah penyelesaian sengketa batas daerah antar Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang dicapai / Jumlah penyelesaian sengketa batas daerah antar Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang ditargetkan x 100 %	40 orang	√	√	√	√
					Kegiatan Penyusunan Sistem Informasi data Administrasi Kewilayahan	terlaksananya monitoring dan evaluasi	terlaksananya monitoring dan evaluasi yang dicapai /terlaksananya monitoring dan evaluasi yang ditargetka x 100 %	7 Kabupaten/Kota		√	√	√
					Kegiatan Inventarisasi dan Pemutakhiran Data Rupabumi	terlaksananya monitoring dan evaluasi	terlaksananya monitoring dan evaluasi yang dicapai /terlaksananya monitoring dan evaluasi yang ditargetka x 100 %	7 Kabupaten/Kota			√	√
					Kegiatan Penegasan Batas Daerah		Jumlah segmen batas daerah yang diinventarisir yang dicapai / Jumlah segmen batas daerah yang diinventarisir yang ditargetkan x 100 %	7Kabupaten/Kota			√	√

3	Terwujudnya ASN pemerintah provinsi yang profesional dalam memberikan pelayanan	Meningkatnya koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah yang efisien dibidang otonomi daerah, administrasi kewilayahan dan kerjasama	Presentase pelayanan administrasi dan penyediaan dokumen bagi pemerintah daerah	TW 1: 25 % TW 2 : 50 % TW 3 : 75 % TW 4 : 100 %	Program Pengembangan Kerja Sama Pemerintah Daerah	Meningkatnya jumlah kerjasama antar pemerintah daerah, swasta dan luar negeri	jumlah kerjasama antar pemerintah daerah, swasta dan luar negeri yang dicapai/ jumlah kerjasama antar pemerintah daerah, swasta dan luar negeri yang ditargetkan x 100 %	Persen ( % )	√	√	√	√
					Rapat Koordinasi Gubernur dengan Bupati/Walikota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Terlaksananya Rapat Koordinasi antara Gubernur dengan Bupati dan Walikota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Terlaksananya Rapat Koordinasi antara Gubernur dengan Bupati dan Walikota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	1 Kali rapat	√	√	√	√
					Kegiatan Partisipasi Kontribusi Iuran dan Keikutsertaan dalam Rakor/Rakernas APPSI	Terlaksananya keikutsertaan Provinsi dalam APPSI	Terlaksananya keikutsertaan Provinsi dalam APPSI	1 kali		√	√	√
					Kegiatan Partisipasi Kontribusi Iuran dan Keikutsertaan dalam Rapat Kerja BKS Provinsi Kepulauan	Terlaksananya keikutsertaan dalam BKS Provinsi	Terlaksananya keikutsertaan dalam BKS Provinsi	1 kali		√	√	√
					Pengembangan Kesepakatan dan Perjanjian Kerjasama	Tersusunnya rekomendasi kerjasama/perjanjian	Tersusunnya rekomendasi kerjasama/perjanjian yang dicapai / rekomendasi kerjasama/perjanjian yang ditargetkan x 100	50 persen		√	√	√
					Kegiatan Inventarisasi potensi kerjasama	Terlaksananya inventarisasi potensi kerjasama dengan luar negeri yang dapat dikerjasamakan oleh perangkat daerah	Terlaksananya inventarisasi potensi kerjasama dengan luar negeri yang dapat dikerjasamakan oleh perangkat daerah yang tercapai / Terlaksananya inventarisasi potensi kerjasama dengan luar negeri yang dapat dikerjasamakan oleh perangkat daerah yang ditargetkan x 100	1 Laporan		√	√	√
					Verifikasi dan Validasi bantuan pemerintah provinsi kepada Pemerintah/pemerintahan daerah lainnya dan BUMD	Terlaksananya verifikasi dan validasi bantuan hibah kepada pemerintah/pemerintahan daerah lainnya dan BUMD	Terlaksananya verifikasi dan validasi bantuan hibah kepada pemerintah/pemerintahan daerah lainnya dan BUMD yang dicapai /Terlaksananya verifikasi dan validasi bantuan hibah kepada pemerintah/pemerintahan daerah lainnya dan BUMD yang ditargetkan x 100%	5 proposal				√
					Penyelarasan program pemerintah daerah dan pusat	Terlaksananya rapat penyelarasan program pemerintah daerah dengan program instansi vertikal di Prov. Kep. Bangka Belitung	Terlaksananya rapat penyelarasan program pemerintah daerah dengan program instansi vertikal di Prov. Kep. Bangka Belitung yang dicapai/ Terlaksananya rapat penyelarasan program pemerintah daerah dengan program instansi vertikal di Prov. Kep. Bangka Belitung yang ditargetkan x 100 %	4 kali pertemuan		√	√	√

BIRO KESRA												
1	Terwujudnya Birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas	Meningkatnya pelayanan publik dibidang keagamaan	Persentase fasilitas bidang keagamaan	TW 1: 25 % TW 2 : 50 % TW 3 : 75 % TW 4 : 100 %	Program Peningkatan Pembinaan Keagamaan	Prosentase pembinaan keagamaan	Prosentase pembinaan keagamaan yang dicapai/Prosentase pembinaan keagamaan yang ditargetkan x 100	Persen ( % )	√	√	√	√
					Pendampingan Jamaah Haji Prov. Kep. Bangka Belitung	Terseleksinya Petugas Haji Daerah TPHD/TKHD 7 orang	Terseleksinya Petugas Haji Daerah TPHD/TKHD 7 orang yang tercapai/Terseleksinya Petugas Haji Daerah TPHD/TKHD 7 orang yang ditargetkan x 100 %	9 orang	√	√	√	√
					Penyelenggaraan Pemberangkatan dan Pemulangan Jamaah Haji	Jumlah Jemaah haji yang diberangkatan	Jumlah Jemaah haji yang diberangkatan yang tercapai/ Jumlah Jemaah haji yang diberangkatan yang ditargetkan x 100 %	1100 orang			√	√
					Peningkatan Kehidupan Beragama pada Bulan Ramadhan	Frekuensi Peyelenggaraan Safari Ramadhan	Frekuensi Peyelenggaraan Safari Ramadhan yang dicapai /Frekuensi Peyelenggaraan Safari Ramadhan yang ditargetkan x 100 %	17 Masjid dan Rumah Jabatan	√	√	√	√
					Pembinaan Mental dan Spritual Masyarakat provinsi Kep.Bangka Belitung	persentase pembinaan masyarakat	persentase pembinaan masyarakat yang dicapai/persentase pembinaan masyarakat yang ditargetkan x 100 %	80%	√	√	√	√
					Pembiayaan Transportasi Domestik Jemaah Haji	Jumlah Jemaah yang Terfasilitasi Biaya Domestik Haji	Jumlah Jemaah yang Terfasilitasi Biaya Domestik Haji yang dicapai / umlah Jemaah yang Terfasilitasi Biaya Domestik Haji yang ditargetkan x 100%	1100 Orang			√	√
					Pembinaan dan Pemberangkatan Khafilah STQ Nasional	Jumlah Khafilah yang mengikuti STQ	Jumlah Khafilah yang mengikuti STQ yang dicapai/Jumlah Khafilah yang mengikuti STQ yang ditargetkan x 100 %	30 orang	√	√	√	√
					Pekan Olah Raga dan Seni antar Pondok Pesantren Tingkat Daerah Prov. Kep.Babel	Terlaksananya Kegiatan	Terlaksananya Kegiatan	500 orang	√	√	√	√
					Pembinaan dan Pemberangkatan Kontingen POSPENAS	Terlaksananya Kegiatan	Terlaksananya Kegiatan	100 orang			√	√
		Meningkatnya pelayanan publik kepada penerima hibah dan bansos	Persentase masyarakat penerima hibah dan bansos yang terbaru	TW 1: 25 % TW 2 : 50 % TW 3 : 75 % TW 4 : 100 %	Program Peningkatan Koordinasi Kebijakan Sosial, Kesehatan, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	Prosentase koordinasi kebijakan sosial, kesehatan, tenaga kerja dan transmigrasi	Prosentase koordinasi kebijakan sosial, kesehatan, tenaga kerja dan transmigrasi yang dicapai/Prosentase koordinasi kebijakan sosial, kesehatan, tenaga kerja dan transmigrasi yang ditargetkan x 100 %	Persen ( % )	√	√	√	√
					Evaluasi dan Analisi Proposal Bansos dan Hibah	Terlaksananya Evaluasi dan Analisis Proposal Bansos dan Hibah	Terlaksananya Evaluasi dan Analisis Proposal Bansos dan Hibah yang dicapai/Terlaksananya Evaluasi dan Analisis Proposal Bansos dan Hibah yang ditargetkan x 100 %	500 Proposal		√	√	√
					Monitoring dan evaluasi dana bantuan sosial dan hibah	Meningkatnya kegiatan monitoring dan evaluasi bansos dan hibah	Meningkatnya kegiatan monitoring dan evaluasi bansos dan hibah yang dicapai/Meningkatnya kegiatan monitoring dan evaluasi bansos dan hibah yang ditargetkan x 100%	200 Proposal		√	√	√

					Rapat Bagian Sosial, Kesehatan, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi	terlaksannya pelayanan yang optimal kepada masyarakat	terlaksannya pelayanan yang optimal kepada masyarakat yang dicapai/terlaksannya pelayanan yang optimal kepada masyarakat yang ditargetkan x 100 %	21 Rekomendasi		√	√	√
		Meningkatnya pelayanan di bidang pendidikan KB, pemuda dan Pariwisata	Persentase perumusan kebijakan dan koordinasi bidang pendidikan KB, pemuda dan pariwisata	TW 1: 25 % TW 2 : 50 % TW 3 : 75 % TW 4 : 100 %	Program Peningkatan Koordinasi Kebijakan Pendidikan, KB, Pemuda dan Pariwisata	prosentase pengembangan pendidikan, keluarga berencana, pemuda dan pariwisata	prosentase pengembangan pendidikan, keluarga berencana, pemuda dan pariwisata dicapai/ prosentase pengembangan pendidikan, keluarga berencana, pemuda dan pariwisata yang ditargetkan x 100 %	Persen ( % )	√	√	√	√
					Pelaksanaan Kegiatan TP UKS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Jumlah Sekolah yang dinilai	Jumlah Sekolah yang dinilai yang tercapai /Jumlah Sekolah yang dinilai yang ditargetkan x 100%	28 Sekolah	√	√	√	√
					Peningkatan Kecintaan Bermasyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Jumlah Partisipasi Acara HUT Bangka Belitung	Jumlah Partisipasi Acara HUT Bangka Belitung yang dicapai/Jumlah Partisipasi Acara HUT Bangka Belitung yang ditargetkan x 100 %	3000 orang				√
BIRO HUKUM												
1	Terwujudnya penyusunan kebijakan di bidang produk hukum, penyusunan peraturan perundang-undangan, pelayanan hukum serta dokumentasi dan informasi hukum	Meningkatnya penyusunan kebijakan di bidang produk hukum, peyusunan peraturan perundang-undangan, layanan hukum serta dokumentasi dan informasi hukum	Persentase kualitas dan kuantitas produk hukum	TW 1: 25 % TW 2 : 50 % TW 3 : 75 % TW 4 : 100 %	Program Peningkatan Penataan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase penataan Peraturan Perundang-undangan	Persentase penataan Peraturan Perundang-undangan yang dicapai/Persentase penataan Peraturan Perundang-undangan yang ditargetkan x 100 %	Persen ( % )	√	√	√	√
					Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah (PHD) yang selesai disusun	Jumlah Produk Hukum Daerah (PHD) yang dicapai/Jumlah Produk Hukum Daerah (PHD) yang ditarget x 100 %	70 Peraturan Gubernur	√	√	√	√
					Penyusunan Naskah Hukum Lainnya	Jumlah Naskah Hukum Lainnya (NHL) yang selesai disusun	Jumlah Naskah Hukum Lainnya (NHL) yang dicapai/Jumlah Naskah Hukum Lainnya (NHL) yang ditargetkan x 100 %	100 NHL	√	√	√	√
					Evaluasi Raperda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Raperda Kabupaten/Kota yang selesai dievaluasi	Jumlah Raperda Kabupaten/Kota yang dicapai/ Jumlah Raperda Kabupaten/Kota yang ditargetkan x 100 %	12 Raperda	√	√	√	√
					Penyusunan Propempperda dan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Usulan Propempperda yang selesai disusun	Jumlah Usulan Propempperda yang dicapai/ Jumlah Usulan Propempperda yang ditargetkanx 100 %	1 Usulan Propempperda	√	√	√	√

			Persentase pelayanan hukum pemerintah daerah	TW 1: 25 % TW 2 : 50 % TW 3 : 75 % TW 4 : 100 %	Program Peningkatan Pelayanan Hukum Pemerintah Daerah	Persentase Pelayanan Hukum	Persentase Pelayanan Hukum yang dicapai/Persentase Pelayanan Hukum yang ditargetkanx 100 %	Persen ( % )	√	√	√	√
					Penyelesaian Perselisihan/Sengketa Perdata antara Pemda dengan Orang/Masyarakat secara Litigasi atau Non Litigasi	Jumlah Kasus Sengketa Perdata yang melalui tahapan proses penyelesaian	Jumlah Kasus Sengketa Perdata yang melalui tahapan proses penyelesaian yang dicapai/Jumlah Kasus Sengketa Perdata yang melalui tahapan proses penyelesaian yang ditargetx 100 %	2 Kasus	√	√	√	√
					Penyelesaian Sengketa TUN akibat Pelaksanaan Produk Hukum dan Kebijakan Pemda	Jumlah Kasus Sengketa TUN yang melalui tahapan proses penyelesaian	Jumlah Kasus Sengketa TUN yang melalui tahapan proses penyelesaian yang dicapai/Jumlah Kasus Sengketa TUN yang melalui tahapan proses penyelesaian yang ditarget x 100 %	2 Kasus	√	√	√	√
					Pembinaan Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Akibat Pelaksanaan Produk Hukum Daerah dan Kebijakan Pemda di Kab/Kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Jumlah Laporan Pembinaan Penyelesaian Sengketa Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pembinaan Penyelesaian Sengketa Kabupaten/Kota yang dicapai	1 Laporan	√	√	√	√
					Pembinaan Pelaksanaan RANHAM di Kab/Kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Jumlah Laporan Pembinaan Pelaksanaan Rencana Hak Asasi Manusia (HAM) di Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pembinaan Pelaksanaan Rencana Hak Asasi Manusia (HAM) di Provinsi dan Kabupaten/Kota	4 Laporan	√	√	√	√
					Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin oleh Lembaga Bantuan Hukum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Jumlah masyarakat miskin yang diberikan bantuan hukum	Jumlah masyarakat miskin yang diberikan bantuan hukum yang dicapai/ Jumlah masyarakat miskin yang diberikan bantuan hukum yang ditargetkan x 100 %	40 Orang	√	√	√	√
			Persentase publikasi produk hukum	TW 1: 25 % TW 2 : 50 % TW 3 : 75 % TW 4 : 100 %	Program Pengembangan Dokumentasi Hukum Dan Informasi Hukum	Persentase Pengembangan Dokumentasi Hukum dan Informasi Hukum	Persentase Pengembangan Dokumentasi Hukum dan Informasi Hukum yang dicapai/Persentase Pengembangan Dokumentasi Hukum dan Informasi Hukum yang ditargetkan x100%	Persen ( % )	√	√	√	√
					Pengelolaan dan Pengembangan JDIH	Jumlah Peraturan Perundang-undangan yang dipublikasi melalui website JDIH	Jumlah Peraturan Perundang-undangan yang dipublikasi melalui website JDIH yang dicapai/Jumlah Peraturan Perundang-undangan yang dipublikasi melalui website JDIH yang ditarget x 100 %	80 Peraturan Perundang-undangan	√	√	√	√
					Penyusunan Katalog Perda dan Pergub Tahun 2001 - 2017 dan Kompilasi Perda dan Pergub Tahun 2017	Jumlah Buku Kompilasi dan Katalog Perda/Pergub yang tersedia	Jumlah Buku Kompilasi dan Katalog Perda/Pergub yang tersedia yang dicapai/ Jumlah Buku Kompilasi dan Katalog Perda/Pergub yang tersedia yang ditarget x 100 %	150 Buku		√	√	√
					Rakor Biro Hukum dan Bagian Hukum Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Jumlah Rekomendasi Pembangunan di Bidang Hukum	Jumlah Rekomendasi Pembangunan di Bidang Hukum yang dicapai/ Jumlah Rekomendasi Pembangunan di Bidang Hukum yang ditargetkan x 100 %	1 Rekomendasi	√	√	√	√

BIRO EKONOMI													
1	Meningkatnya rekomendasi kebijakan bidang perekonomian	Meningkatnya rekomendasi kebijakan di bidang sumber daya alam	Persentase rekomendasi kebijakan terkait sumber daya alam	TW 1: 25 % TW 2 : 50 % TW 3 : 75 % TW 4 : 100 %	Program Peningkatan Koordinasi Kebijakan Sumber Daya Alam	Prosentase Koordinasi Kebijakan Sumber Daya Alam	Prosentase Koordinasi Kebijakan Sumber Daya Alam yang dicapai/Prosentase Koordinasi Kebijakan Sumber Daya Alam yang ditarget x 100 %	Persen ( % )	√	√	√	√	
					Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Distribusi Bahan Bakar Minyak dan Gas di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Jumlah masyarakat penerima Gas Elpiji 3Kg dan BBM	Jumlah masyarakat penerima Gas Elpiji 3Kg dan BBM yang dicapai/ Jumlah masyarakat penerima Gas Elpiji 3Kg dan BBM yang ditargetkanx 100 %	1 Rekomendasi	√	√	√	√	
					Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Penataan sert Pengembangan Lahan Kritis di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Jumlah Rekomendasi Kebijakan kerjasama investasi pertambangan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan kerjasama investasi pertambangan yang dicapai/ Jumlah Rekomendasi Kebijakan kerjasama investasi pertambangan yang ditargetkanx 100 %	1 Rekomendasi		√	√	√	
					Monitoring dan evaluasi Perizinan Analisis mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Persentase peningkatan pengawasan AMDAL	Persentase peningkatan pengawasan AMDAL yang dicapai/Persentase peningkatan pengawasan AMDAL yang ditargetkanx 100 %	1 Rekomendasi	√	√	√	√	
					Monitoring dan Evaluasi Tim Terpadu Penanganan Penambangan Timah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Jumlah Rekomendasi dan kerjasama antar tim terpadu penanganan masalah pertambangan timah	Jumlah Rekomendasi dan kerjasama antar tim terpadu penanganan masalah pertambangan timah yang dicapai/ Jumlah Rekomendasi dan kerjasama antar tim terpadu penanganan masalah pertambangan timah yang ditargetkan x 100 %	1 Rekomendasi			√	√	
					Monitoring, Evaluasi dan Koordinasi Komoditi Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Jumlah Laporan Komoditi Pangan	Jumlah Laporan Komoditi Pangan	1 Rekomendasi	√	√	√	√	
		Meningkatnya rekomendasi kebijakan di Bidang BUMD, Penanaman Modal , Pariwisata dan Budaya	Persentase rekomendasi kebijakan terkait BUMD, Penanaman Modal , Pariwisata dan Budaya yang di implementasikan	TW 1: 25 % TW 2 : 50 % TW 3 : 75 % TW 4 : 100 %	Program Peningkatan Koordinasi Bumd, Penanaman Modal, Pariwisata dan Budaya	Prosentase Koordinasi Kebijakan BUMD, Penanaman Modal, Pariwisata dan Budaya	Prosentase Koordinasi Kebijakan BUMD, Penanaman Modal, Pariwisata dan Budaya yang dicapai/Prosentase Koordinasi Kebijakan BUMD, Penanaman Modal, Pariwisata dan Budaya yang ditargetkan x 100 %	Persen ( % )	√	√	√	√	
					Pembentukan Bank Umum Syariah Bangka Belitung	Jumlah dokumen Pembentukan bank umum syariah Bangka Belitung	Jumlah dokumen Pembentukan bank umum syariah Bangka Belitung yang dicapai/ Jumlah dokumen Pembentukan bank umum syariah Bangka Belitung yang ditargetkanx 100 %	1 Rekomendasi	√	√	√	√	
					Koordinasi Program CSR di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Jumlah Rekomendasi/Kesepakatan Program CSR di Provinsi	Jumlah Rekomendasi/Kesepakatan Program CSR di Provinsi yang dicapai/Jumlah Rekomendasi/Kesepakatan Program CSR di Provinsi yang ditargetkan x 100 %	2 Rekomendasi	√	√	√	√	



					Monitoring dan Evaluasi Penyertaan Modal di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Jumlah laporan Penyertaan Modal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Jumlah laporan Penyertaan Modal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang dicapai/Jumlah laporan Penyertaan Modal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang ditargetkan x 100 %	1 Rekomendasi	√	√	√	√
					Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Kajian dan Penyusunan Perlindungan Benda Cagar Budaya atau Benda diduga cagar budaya	Jumlah benda cagar budaya atau benda diduga caga budaya	Jumlah benda cagar budaya atau benda diduga caga budaya yang dicapai/Jumlah benda cagar budaya atau benda diduga caga budaya yang ditargetkan x 100 %	1 Rekomendasi	√	√	√	√
					Rakor Teknis Tata Kelola BUMD di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Jumlah dokumen tata laksana BUMD se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Jumlah dokumen tata laksana BUMD se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang dicapai/ Jumlah dokumen tata laksana BUMD se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang ditargetkan x 100 %	1 Rekomendasi	√	√	√	√
		Meningkatnya rekomendasi kebijakan di Bidang Administrasi Perekonomian	Persentase Rekomendasi Kebijakan terkait Administrasi Perekonomian yang di implementasikan	TW 1: 25 % TW 2 : 50 % TW 3 : 75 % TW 4 : 100 %	Program Peningkatan Koordinasi Kebijakan Perekonomian	Prosentase Koordinasi Kebijakan Perekonomian	Prosentase Koordinasi Kebijakan Perekonomian yang dicapai/ Prosentase Koordinasi Kebijakan Perekonomian yang ditargetkan x 100 %	Persen ( % )	√	√	√	√
					Koordinasi Pengawasan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Jumlah Rekomendasi Tim Pengendalian inflasi daerah	Jumlah Rekomendasi Tim Pengendalian inflasi daerah yang dicapai/Jumlah Rekomendasi Tim Pengendalian inflasi daerah yang ditarget x 100 %	2 Rekomendasi	√	√	√	√
					Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Koperasi dan UMKM di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Jumlah data koperasi dan UKM yang aktif di Prov.Kep.Babel	Jumlah data koperasi dan UKM yang aktif di Prov.Kep.Babel yang dicapai/Jumlah data koperasi dan UKM yang aktif di Prov.Kep.Babel yang ditarget x 100 %	2 Rekomendasi	√	√	√	√
					Monitoring dan Evaluasi Analisis Makro Ekonomi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Jumlah Rekomendasi Analisis Makro Ekonomi	Jumlah Rekomendasi Analisis Makro Ekonomi yang dicapai/ Jumlah Rekomendasi Analisis Makro Ekonomi yang ditarget x 100 %	2 Rekomendasi	√	√	√	√
					Monitoring,Evaluasi Promosi potensi daerah (EXPO) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Jumlah Laporan Pengembangan Destinasi Wisata Baru	Jumlah Laporan Pengembangan Destinasi Wisata Baru yang dicapai/Jumlah Laporan Pengembangan Destinasi Wisata Baru yang ditarget x 100 %	1 Rekomendasi	√	√	√	√
					Forum Pengembangan Ekonomi	Jumlah laporan antara OPD Provinsi, Kab/Kota	Jumlah laporan antara OPD Provinsi, Kab/Kota yang dicapai / Jumlah laporan antara OPD Provinsi, Kab/Kota yang ditarget x 100 %	1 Rekomendasi	√	√	√	√
					Monitoring dan Evaluasi Sistem Resi Gudang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Persentase peningkatan harga jual dan stabilnya harga penjualan hasil	Persentase peningkatan harga jual dan stabilnya harga penjualan hasil yang dicapai/ Persentase peningkatan harga jual dan stabilnya harga penjualan hasil yang ditarget x 100 %	1 Rekomendasi	√	√	√	√
					Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Usaha Mikro,Kecil dan Menengah (UMKM) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Jumlah UMKM yang aktif di Prov.Kep.Babel	Jumlah UMKM yang aktif di Prov.Kep.Babel	1 Rekomendasi	√	√	√	√

BIRO PEMBANGUNAN												
1	Meningkatnya akuntabilitas penyusunan kebijakan dan koordinasi bidang pembangunan	Meningkatnya fasilitasi pengendalian kebijakan dan koordinasi bidang pembangunan	Persentase fasilitasi kebijakan dan koordinasi bidang pembangunan yang dimanfaatkan	TW 1: 25 % TW 2 : 50 % TW 3 : 75 % TW 4 : 100 %	Program Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan APBN	Prosentase Realisasi Keuangan dan Realisasi Fisik Penyelenggaraan Dana APBN di Provinsi dan Kabupaten/Kota	Prosentase Realisasi Keuangan dan Realisasi Fisik Penyelenggaraan Dana APBN di Provinsi dan Kabupaten/Kotayang dicapai/ Prosentase Realisasi Keuangan dan Realisasi Fisik Penyelenggaraan Dana APBN di Provinsi dan Kabupaten/Kotayang ditargetkan x 100 %	Persen ( % )	√	√	√	√
					Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi Sistem e-Monev APBN	Jumlah Aplikasi e-Monev APBN	Jumlah Aplikasi e-Monev APBN yang dicapai /Jumlah Aplikasi e-Monev APBN yang ditargetkan x 100 %	1 Aplikasi	√	√	√	√
					Pembinaan dan Pengendalian Kegiatan Pembangunan yang bersumber dari APBN	Jumlah Laporan	Jumlah Laporan yang dicapai / Jumlah Laporan yang ditarget x 100 %	2 Laporan	√	√	√	√
					Program Perencanaan Setda	Persentase Dokumen Keuangan dan Laporan Kinerja meningkat	Persentase Dokumen yang dicapai/ Persentase Dokumen yang ditargetkan x 100 %	Persen ( % )	√	√	√	√
					Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan yang dicapai /Jumlah Dokumen Perencanaan yang ditargetkan x 100 %	4 Dokumen	√	√	√	√
					Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Sekretariat Daerah	Jumlah Laporan	Jumlah Laporan yang dicapai / Jumlah Laporan yang ditarget x 100 %	4 Laporan	√	√	√	√
					Program Pengendalian Pembangunan Daerah	Prosentase Realisasi Keuangan dan Realisasi Fisik Penyelenggaraan Dana APBD di Provinsi dan Kabupaten/Kota	Prosentase Realisasi Keuangan dan Realisasi Fisik Penyelenggaraan Dana APBD di Provinsi dan Kabupaten/Kota yang dicapai / Prosentase Realisasi Keuangan dan Realisasi Fisik Penyelenggaraan Dana APBD di Provinsi dan Kabupaten/Kota yang ditargetkan x 100 %	Persen ( % )	√	√	√	√
					Pengendalian Percepatan Pembangunan di Provinsi Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi Sinkronisasi Pengendalian Percepatan Pembangunan di Provinsi Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi Sinkronisasi Pengendalian Percepatan Pembangunan di Provinsi Kabupaten/Kota yang dicapai /Jumlah Laporan Koordinasi Sinkronisasi Pengendalian Percepatan Pembangunan di Provinsi Kabupaten/Kota yang ditargetkan x 100 %	1 Laporan	√	√	√	√
					Program Monitoring Dan Evaluasi Pelaksanaan Apbd	Persentase Realisasi Program dan Kegiatan APBD Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Persentase Realisasi Program dan Kegiatan APBD Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang dicapai / Persentase Realisasi Program dan Kegiatan APBD Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang ditargetkan x 100 %	Persen ( % )	√	√	√	√
					Kebijakan Monitoring Evaluasi APBD	Jumlah Dokumen Laporan Kebijakan Monitoring	Jumlah Dokumen Laporan Kebijakan Monitoring yang dicapai/ Jumlah Dokumen Laporan Kebijakan Monitoring yang ditarget x 100 %	1 Laporan				√

					Peningkatan Fungsi Sitem E-Monev APBD	Jumlah Laporan Koordinasi Sistem E-Monep	Jumlah Laporan Koordinasi Sistem E-Monep yang dicapai /Jumlah Laporan Koordinasi Sistem E-Monep yang ditarget x 100 %	1 Laporan	√	√	√	√
					Peningkatan Capaian Realisasi APBD	Rekomendasi APBD	Rekomendasi APBD yang dicapai/ Rekomendasi APBD yang di target x 100 %	1 Rekomendasi	√	√	√	√
					Peningkatan Fungsi Sismontepra APBD Provinsi, Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi dan Laporan	Jumlah Rekomendasi dan Laporan yang dicapai/ Jumlah Rekomendasi dan Laporan yang ditargetkan x 100 %	1 Laporan		√	√	√
BIRO LAYANAN PENGADAAN												
1	Terwujudnya efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran belanja daerah atau negara	Terciptanya pengadaan barang atau jasa yang transparan, akuntabel, terbuka dan kompetitif	Persentase belanja pengadaan melalui e-procurement	TW 1: 25 % TW 2 : 50 % TW 3 : 75 % TW 4 : 100 %	Program Pengembangan Data Informasi Layanan Pengadaan	Persentase data dan informasi pengadaan barang/jasa yang dikelola dan dipublikasikan berbasis IT	Persentase data dan informasi pengadaan barang/jasa yang dikelola dan dipublikasikan berbasis IT yang dicapai /Persentase data dan informasi pengadaan barang/jasa yang dikelola dan dipublikasikan berbasis IT yang ditarget x 100 %	Persen ( % )	√	√	√	√
					Peningkatan penerapan data dan informasi layanan	Jumlah penyediaan sarana dan prasarana pendukung sistem pengelolaan informasi barang/jasa	Jumlah penyediaan sarana dan prasarana pendukung sistem pengelolaan informasi barang/jasa yang dicapai / Jumlah penyediaan sarana dan prasarana pendukung sistem pengelolaan informasi barang/jasa yang ditargetkan x 100 %	1 Aplikasi	√	√	√	√
					Peningkatan Pelayanan Publik	Jumlah SOP dan Penerapannya	Jumlah SOP dan Penerapannya yang dicapai /Jumlah SOP dan Penerapannya yang ditargetkan x 100 %	1 dokumen		√	√	√
					Pengelolaan data dan informasi	Jumlah Aplikasi Pengelolaan Data dan Informasi PBJ	Jumlah Aplikasi Pengelolaan Data dan Informasi PBJ yang dicapai/Jumlah Aplikasi Pengelolaan Data dan Informasi PBJ yang ditargetkan x 100 %	41 OPD	√	√	√	√
					Peningkatan Administrasi Ketatausahaan	Jumlah Dokumen dukungan data perencanaan, pelaporan dan ketatausahaan	Jumlah Dokumen dukungan data perencanaan, pelaporan dan ketatausahaan yang dicapai /Jumlah Dokumen dukungan data perencanaan, pelaporan dan ketatausahaan yang ditargetkan x 100 %	8 Dokumen	√	√	√	√
					Program Peningkatan Layanan Pengadaan Barang Dan Jasa	Persentase RPP siap lelang yang selesai ditangani ULP	Persentase RPP siap lelang yang selesai ditangani ULP yang dicapai/Persentase RPP siap lelang yang selesai ditangani ULP yang ditarget x100 %	Persen ( % )	√	√	√	√
					peningkatan Fungsi pelayanan ULP	Jumlah Waktu Layanan Pengadaan oleh ULP	Jumlah Waktu Layanan Pengadaan oleh ULP yang dicapai / Jumlah Waktu Layanan Pengadaan oleh ULP yang ditargetkan x 100 %	12 Bulan	√	√	√	√
					Peningkatan Pembinaan Pengadaan barang dan Jasa	Frekuensi Pelatihan / Pembinaan / bimtek /	Frekuensi Pelatihan,Pembinaan, bimtek, yang dicapai/ Frekuensi Pelatihan,Pembinaan, bimtek ,yang ditargetkan x 100 %	2 Sosialisasi/Bimtek		√	√	√

					Pencegahan dan Penanganan Pengaduan	Jumlah Sosialisasi	Jumlah Sosialisasi	1 Sosialisasi/Bimtek		√	√	√
					Program Peningkatan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Persentase Penggunaan e - Procrument terhadap belanja pengadaan	Persentase Penggunaan e - Procrument terhadap belanja pengadaan yang dicapai / Persentase Penggunaan e - Procrument terhadap belanja pengadaan yang ditargetkan x 100 %	Persen ( % )	√	√	√	√
					Peningkatan Fungsi Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Bulan Layanan oleh LPSE	Jumlah Bulan Layanan oleh LPSE yang dicapai/ Jumlah Bulan Layanan oleh LPSE yang ditargetkan x 100 %	12 Bulan	√	√	√	√
					Peningkatan Layanan dan Dukungan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Penerapan aplikasi pendukung SPSE	Jumlah Penerapan aplikasi pendukung SPSE yang dicapai /Jumlah Penerapan aplikasi pendukung SPSE yang ditargetkan x 100 %	3 Aplikasi	√	√	√	√
					Peningkatan Pelayanan dan Registrasi dan Verifikasi	Jumlah Penerapan aplikasi Penyedia Barang/Jasa 1 Aplikasi	Jumlah Penerapan aplikasi Penyedia Barang/Jasa 1 Aplikasi yang dicapai/ Jumlah Penerapan aplikasi Penyedia Barang/Jasa 1 Aplikasi yang ditargetkan x 100 %	1 Aplikasi	√	√	√	√
					Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Bulan Pemeliharaan Jaringan & Perangkat SPSE	Jumlah Bulan Pemeliharaan Jaringan & Perangkat SPSE yang dicapai /Jumlah Bulan Pemeliharaan Jaringan & Perangkat SPSE yang ditargetkan	12 Bulan	√	√	√	√
BIRO ORGANISASI												
1	Birokrasi yang bersih dan akurat	Meningkatnya nilai manajemen perubahan	Persentase Peningkatan komitmen pimpinan PD dan pegawai dalam melakukan RB	TW 1: 25 % TW 2 : 50 % TW 3 : 75 % TW 4 : 100 %	Program Peningkatan Dan Pengembangan Kelembagaan Serta Analisis Jabatan	Persentase organisasi perangkat daerah yang tepat fungsi dan ukuran kelembagaannya	Persentase organisasi perangkat daerah yang tepat fungsi dan ukuran kelembagaannya yang tercapai/Persentase organisasi perangkat daerah yang tepat fungsi dan ukuran kelembagaannya yang ditargetkan x 100 %	Persen ( % )	√	√	√	√
			Persentase pola pikir dan budaya kerja	TW 1: 25 % TW 2 : 50 % TW 3 : 75 % TW 4 : 100 %		Persentase jumlah pejabat struktural ASN yang memahami dan mengimplementasikan uraian tugas dan fungsi	Persentase jumlah pejabat struktural ASN yang memahami dan mengimplementasikan uraian tugas dan fungsi yang tercapai / Persentase jumlah pejabat struktural ASN yang memahami dan mengimplementasikan uraian tugas dan fungsi yang ditargetkan x 100 %	Persen ( % )	√	√	√	√
			Persentase menurunnya resiko kegagalan	TW 1: 25 % TW 2 : 50 % TW 3 : 75 % TW 4 : 100 %		Persentase ASN memahami dan mengimplementasikan analisa jabatan,analisa beban kerja,peta jabatan dan standar kompetensi teknis	Persentase ASN memahami dan mengimplementasikan analisa jabatan,analisa beban kerja,peta jabatan dan standar kompetensi teknis yang tercapai /Persentase ASN memahami dan mengimplementasikan analisa jabatan,analisa beban kerja,peta jabatan dan standar kompetensi teknis yang ditargetkan x 100 %	Persen ( % )	√	√	√	√

		Meningkatnya penataan dan penguatan organisasi	Persentase perangkat daerah yang efektif dan efisien)	TW 1: 25 % TW 2 : 50 % TW 3 : 75 % TW 4 : 100 %		Persentase jumlah OPD provinsi, kabupaten, kota yang efektif dan efisien	Persentase jumlah OPD provinsi, kabupaten, kota yang efektif dan efisien yang dicapai / Persentase jumlah OPD provinsi, kabupaten, kota yang efektif dan efisien yang ditargetkan x 100 %	Persen ( % )	√	√	√	√
					Evaluasi Kelembagaan UPT/Cabdin Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Jumlah laporan pembinaan kelembagaan	Jumlah laporan pembinaan kelembagaan yang dicapai/Jumlah laporan pembinaan kelembagaan yang ditargetkan x 100 %	1 dokumen		√	√	√
					Pembinaan dan Pengendalian kelembagaan perangkat daerah Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Jumlah dokumen pembinaan 40 PD di lingkungan pemerintah provinsi kepulauan bangka belitung	Jumlah dokumen pembinaan 40 PD di lingkungan pemerintah provinsi kepulauan bangka belitung yang dicapai /Jumlah dokumen pembinaan 40 PD di lingkungan pemerintah provinsi kepulauan bangka belitung yang ditargetkan x 100 %	1 laporan	√	√	√	√
					Penataan Perangkat Daerahb Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Jumlah dokumen laporan	Jumlah dokumen laporan yang dicapai/Jumlah dokumen laporan yang ditargetkan x 100 %	1 dokumen		√	√	√
					Validasi analisis jabatan dan analisis beban kerja Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Jumlah dokumen Anjab dan ABK	Jumlah dokumen Anjab dan ABK yang dicapai/Jumlah dokumen Anjab dan ABK yang ditargetkan x 100%	2 Dokumen	√	√	√	√
					Validasi standar kompetensi jabatan aparatur sipil negara pada perangkat daerah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Jumlah dokumen standar kompetensi teknis	Jumlah dokumen standar kompetensi teknis yang dicapai/Jumlah dokumen standar kompetensi teknis yang ditargetkan x 100 %	1 Dokumen		√	√	√
					Validasi evaluasi jabatan pegawai negeri sipil pada satuan kerja perangkat daerah di lingkungan pemerintah Provinsi Kepualaun Bangka Belitung	Jumlah dokumen evaluasi jabatan	Jumlah dokumen evaluasi jabatan yang dicapai/Jumlah dokumen evaluasi jabatan yang ditargetkan x 100 %	1 Dokumen	√	√	√	√
		Meningkatnya penataan ketatalaksanaan Pemda	Persentase peningkatan ketatalaksanaan Pemda	TW 1: 25 % TW 2 : 50 % TW 3 : 75 % TW 4 : 100 %	Program Peningkatan Dan Pengembangan Tata Laksana Pemerintah Daerah	Peningkatan kinerja sumber daya aparatur	Peningkatan kinerja sumber daya aparatur yang dicapai /Peningkatan kinerja sumber daya aparatur yang ditarget x 100 %	Persen ( % )	√	√	√	√
		Meningkatnya kualitas pembinaan pelayanan publik	Index pelayanan publik	TW 1: 25 % TW 2 : 50 % TW 3 : 75 % TW 4 : 100 %		Peningkatan kepuasan masyarakat	Peningkatan kepuasan masyarakat	Persen ( % )	√	√	√	√
					Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Jumlah laporan pembinaan pelaksanaan SOP	Jumlah laporan pembinaan pelaksanaan SOP yang dicapai/ Jumlah laporan pembinaan pelaksanaan SOP yang ditargetkanx 100 %	1 laporan	√	√	√	√
					Rapat koordinasi Biro/Bagian Organisasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dokumen kesepakatan Biro/Bagian Organisasi	Dokumen kesepakatan Biro/Bagian Organisasi yang dicapai/ Dokumen kesepakatan Biro/Bagian Organisasi yang ditargetkan x 100 %	1 dokumen		√	√	√

					pembinaan pelaksanaan pelayanan publik di provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Laporan pembinaan pelaksanaan pelayanan publik	Laporan pembinaan pelaksanaan pelayanan publik yang dicapai/Laporan pembinaan pelaksanaan pelayanan publik yang ditargetkan x 100 %	1 laporan	√	√	√	√
					Bimtek penyusunan proposal dan pelatihan admin kompetisi inovasi pelayanan publik	Jumlah Kegiatan Bimtek	Jumlah Kegiatan Bimtek	1 kegiatan	√	√	√	√
					Roadmap Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Jumlah Dokumen roadmap pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen roadmap pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang dicapai/Jumlah Dokumen roadmap pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang ditargetkan x 100 %	1 dokumen				√
					Pelaksanaan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Jumlah dokumen terkait kepuasan masyarakat	Jumlah dokumen terkait kepuasan masyarakat yang dicapai/Jumlah dokumen terkait kepuasan masyarakat yang ditargetkan x 100 %	1 dokumen			√	√
					Peningkatan administrasi ketatausahaan	Jumlah dokumen	Jumlah dokumen	1 laporan	√	√	√	√
					Peningkatan pelaksanaan reformasi birokrasi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Jumlah dokumen laporan pelaksanaan RB	Jumlah dokumen laporan pelaksanaan RB yang dicapai/ Jumlah dokumen laporan pelaksanaan RB yang ditargetkan x 100 %	1 dokumen	√	√	√	√
		Meningkatnya nilai akuntabilitas	Persentase peningkatan nilai laporan kinerja	TW 1: 25 % TW 2 : 50 % TW 3 : 75 % TW 4 : 100 %	Program Peningkatan Dan Pengembangan Kinerja Pemerintah Daerah	Peningkatan nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Peningkatan nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang dicapai/ Peningkatan nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang ditargetkan x 100 %	Persen ( % )	√	√	√	√
					Penyusunan Profil Aparatur Jabatan Struktural	Tersusunnya laporan profil aparatur	Tersusunnya laporan profil aparatur yang dicapai/Tersusunnya laporan profil aparatur yang ditarget x 100 %	15 laporan				
					Forum Sekretaris Daerah Prov.babel	jumlah dokumen kesepakatan	jumlah dokumen kesepakatan yang dicapai/ jumlah dokumen kesepakatan yang ditargetkan x 100 %	1 dokumen				
					Pembinaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Jumlah laporan	Jumlah laporan	1 laporan				
					Pembinaan standar manajemen mutu pada OPD, Cabdin dan UPT di lingkungan pemerintah provinsi kepulauan bangka belitung	laporan pembinaan dan evaluasi profil aparatur UPT	laporan pembinaan dan evaluasi profil aparatur UPT	1 laporan				
					Bimbingan Teknis penyusunan Laporan kinerja, perjanjian kinerja dan rencana aksi kinerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Kabupaten/kota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 7 Kabupaten/kota	Kabupaten/kota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 7 Kabupaten/kota	50 orang				
					Penyusunan perjanjian kinerja dan laporan kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Jumlah dokumen	Jumlah dokumen	1 dokumen				
					Penyusunan standar capaian kinerja individu ASN	Jumlah peserta	Jumlah peserta yang dicapai/ Jumlah peserta yang ditargetkan x 100 %	43 OPD				

BIRO UMUM												
1	Meningkatnya pelayanan umum dan kesekretariatan Setda	Meningkatnya kepuasan atas pelayanan bidang kerumahtanggaan	Tingkat kepuasan atas pelayanan bidang kerumahtanggaan	TW 1: 25 % TW 2 : 50 % TW 3 : 75 % TW 4 : 100 %	Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah	Tingkat kepuasan Aparatur Perangkat Daerah terhadap pelayanan Kesekretariatan	Tingkat kepuasan Aparatur Perangkat Daerah terhadap pelayanan Kesekretariatan yang dicapai/Tingkat kepuasan Aparatur Perangkat Daerah terhadap pelayanan Kesekretariatan yang ditargetkan x 100 %	Persen ( % )	√	√	√	√
		Meningkatnya kepuasan atas pelayanan bidang perlengkapan	Tingkat kepuasan atas pelayanan bidang perlengkapan	TW 1: 25 % TW 2 : 50 % TW 3 : 75 % TW 4 : 100 %	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Aparatur Perangkat Daerah yang terlayani	Persentase Aparatur Perangkat Daerah yang terlayani dicapai/ Persentase Aparatur Perangkat Daerah yang terlayani ditargetkan x 100 %	100%	√	√	√	√
		Meningkatnya kepuasan atas pelayanan bidang keuangan	Tingkat kepuasan atas pelayanan bidang keuangan	TW 1: 25 % TW 2 : 50 % TW 3 : 75 % TW 4 : 100 %	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Aparatur Perangkat Daerah yang memanfaatkan sarana prasarana perkantoran	Persentase Aparatur Perangkat Daerah yang memanfaatkan sarana prasarana perkantoran yang dicapai/ Persentase Aparatur Perangkat Daerah yang memanfaatkan sarana prasarana perkantoran yang ditargetkan x 100 %	100%	√	√	√	√
					Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Aparatur Perangkat Daerah yang meningkat disiplinnya	Persentase Aparatur Perangkat Daerah yang meningkat disiplinnya	100%	√	√	√	√
					Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Daerah	Prosentase pelayanankedinasan kepala daerah dan wakil kepala daerah	Prosentase pelayanankedinasan kepala daerah dan wakil kepala daerah	100%	√	√	√	√
BIRO HUMAS DAN PROTOKOL												
1	Tercapainya informasi kehumasan dan layanan keprotokolan yang efektif, efisien dan berkualitas	Meningkatnya informasi kehumasan yang diterima oleh publik	Persentase informasi kehumasan yang diterima oleh publik	TW 1: 25 % TW 2 : 50 % TW 3 : 75 % TW 4 : 100 %	Program Peningkatan Pelayanan Kehumasan, Dokumentasi, Publikasi Media dan IT	Persentase pemanfaatan media dan IT untuk layanan kehumasan, dokumentasi dan publikasi	Persentase pemanfaatan media dan IT untuk layanan kehumasan, dokumentasi dan publikasi yang dicapai/Persentase pemanfaatan media dan IT untuk layanan kehumasan, dokumentasi dan publikasi yang ditargetkan x 100 %	Persen ( % )	√	√	√	√
					Publikasi Media Massa / Cetak	Jumlah publikasi di media massa/cetak	Jumlah publikasi di media massa/cetak yang dicapai/Jumlah publikasi di media massa/cetak yang ditarget x 100 %	154 Tayang	√	√	√	√
					Publikasi Media Elektronik/IT	Jumlah publikasi di media elektronik dan IT	Jumlah publikasi di media elektronik dan IT yang dicapai/Jumlah publikasi di media elektronik dan IT yang ditarget x 100 %	120 Tayang	√	√	√	√
					Pendokumentasian dan Belanja Spanduk/Baleho	Jumlah publikasi media luar	Jumlah publikasi media luar yang dicapai/Jumlah publikasi media luar yang ditargetkan x 100 %	30 Tayang	√	√	√	√
					Penerbitan Majalah / Buletin Pemerintah Provinsi	Jumlah Terbitan Majalah/Buletin Pemerintah Provinsi	Jumlah Terbitan Majalah/Buletin Pemerintah Provinsi yang dicapai /Jumlah Terbitan Majalah/Buletin Pemerintah Provinsi yang ditargetkan x 100 %	4200 Eksemplar	√	√	√	√
		Meningkatnya agenda pimpinan daerah yang terlayani	Persentase agenda pimpinan daerah yang terlayani	TW 1: 25 % TW 2 : 50 % TW 3 : 75 % TW 4 : 100 %	Program Peningkatan Pelayanan Protokol	Persentase agenda kepala daerah yang terlayani	Persentase agenda kepala daerah yang tercapai/ Persentase agenda kepala daerah yang ditargetkan x 100 %	Persen ( % )	√	√	√	√

					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang dicapai/Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang ditargetkan x 100 %	4600 Buah	√	√	√	√
					Workshop Bidang Keprotokolan	Jumlah SDM yang memiliki kompetensi di bidang keprotokolan	Jumlah SDM yang memiliki kompetensi di bidang keprotokolan yang dicapai/Jumlah SDM yang memiliki kompetensi di bidang keprotokolan yang ditargetkan x 100 %	60 Orang		√	√	√
					Program Peningkatan Publikasi, Pengumpulan dan Penyaringan Informasi	Persentase Pelayanan dan Penyampaian informasi kepada aparatur dan publik	Persentase Pelayanan dan Penyampaian informasi kepada aparatur dan publik yang dicapai/ Persentase Pelayanan dan Penyampaian informasi kepada aparatur dan publik yang ditargetkan x 100 %	Persen ( % )	√	√	√	√
					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan untuk aparatur di sekretariat daerah	Tersedianya bahan bacaan untuk aparatur di sekretariat daerah yang dicapai/Tersedianya bahan bacaan untuk aparatur di sekretariat daerah yang ditargetkan x 100 %	18480 Eksemplar	√	√	√	√
					Pengumpulan, Penyaringan informasi dan Publikasi Kegiatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Dalam dan Luar Daerah di rubah menjadi Pengumpulan Informasi, Layanan Kehumasan, dan keprotokolan	Frekuensi Layanan Publikasi dan Keprotokolan Kegiatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Dalam dan luar Daerah	Frekuensi Layanan Publikasi dan Keprotokolan Kegiatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Dalam dan luar Daerah yang dicapai/Frekuensi Layanan Publikasi dan Keprotokolan Kegiatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Dalam dan luar Daerah yang ditargetkan x 100 %	185 Kali	√	√	√	√
					Penguatan Fungsi Pusat Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	Jumlah Ketersediaan informasi dan dokumentasi yang bisa diakses publik	Jumlah Ketersediaan informasi dan dokumentasi yang bisa diakses publik yang dicapai/Jumlah Ketersediaan informasi dan dokumentasi yang bisa diakses publik yang ditargetkan x 100 %	23 OPD	√	√	√	√
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Layanan Kehumasan dan keprotokolan	Jumlah Ketersediaan Peralatan dan Perlengkapan Layanan Kehumasan dan Keprotokolan	Jumlah Ketersediaan Peralatan dan Perlengkapan Layanan Kehumasan dan Keprotokolan yang dicapai/ Jumlah Ketersediaan Peralatan dan Perlengkapan Layanan Kehumasan dan Keprotokolan yang ditargetkan x 100 %	4010 Buah	√	√	√	√

SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Dr. Yan Megawandi, SH, M.Si  
Pembina Utama  
NIP. 19640130 198811 1 001